

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana kinerja tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) Kementerian Agama yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat menjabarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja, indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sarasarn yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan dlama rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan perpanjangan tugas Menteri Agama Republik Indonesia di Wilayah Provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi Menteri Agama di Daerah.

Tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi kementerian agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
- Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- Pembinaan kerukunan umat beragama;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi

1.2 Landasan Hukum

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.2.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- 1.2.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- 1.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- 1.2.7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 1.2.8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
- 1.2.9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 1.2.10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019;

2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.2.1 Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Agama secara Nasional, Maka Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu kepada Visi Kementerian Agama 2015 -2019 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG
TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN NUSA TENGGARA BARAT YANG
BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN
GOTONG ROYONG”.

Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama.

Rukun memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Indonesia secara baik dan damai. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotong-royongan.

Kecerdasan mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, yang masing-masing indikatornya sebagai berikut:

- 2.1.1 Kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan; berfikir rasionala abstrak, inovatif dan kreatif; serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah (*problem solving*).
- 2.1.2 Kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain.

2.1.3 Kecerdasan spiritual: yaitu mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan akhlak mulia dan nilai-nilai agama Islam, serta menempatkan perilaku hidup dalam konteks makna yang luas.

Sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari berbagai gangguan. Sehingga sejahtera lahir dan batin dalam konteks agama dapat diartikan bahwa setiap umat beragama di Indonesia dapat menjalankan kegiatan beragama secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, serta tersedia sarana dan prasarana beribadah yang memadai bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Agama merupakan salah satu hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia dan Undang-Undang telah menjamin bahwa setiap umat beragama dijamin kebebasannya dalam melaksanakan kegiatan beragamanya. Untuk itu perlu diwujudkan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, tersedianya lingkungan yang bersih, aman dan nyaman bagi kegiatan beragama seluruh masyarakat Indonesia serta adanya keserasian dan saling menghormati tidak hanya sesama manusia tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya.

Dari sisi ekonomi, kesejahteraan lahir dan batin diwujudkan dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti Zakat, Wakaf, Dana Kolekte, Dana Punia, Dana Paramita sehingga mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat beragama. Sejalan dengan visi nasional, dengan memiliki kecerdasan dan kesejahteraan lahir dan bathin maka bangsa Indonesia akan mampu menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

2.2.2 Misi Kementerian Agama

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kementerian Agama adalah:

- 2.2.2.1 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- 2.2.2.2 Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- 2.2.2.3 Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- 2.2.2.4 Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- 2.2.2.5 Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.

- 2.2.2.6 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
- 2.2.2.7 Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

2.2.3 Tujuan dan Sasaran

2.2.3.1 Tujuan

Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan. Secara lebih khusus pembangunan bidang pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Agama, Kementerian Agama menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya.

Tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode 2015-2019 adalah:

- TA.1 Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- TA.2 Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.
- TA.3 Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.
- TA.4 Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.
- TA.5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima.
- TA.6 Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan (TP) adalah:

- TP.1 Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
- TP.2 Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.
- TP.3 Penurunan tingkatkegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
- TP.4 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
- TP.5 Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan.
- TP.6 Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas.
- TP.7 Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas.

2.2.3.2 Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama dan sasaran bidang pendidikan.

Sasaran strategis Kementerian Agama terkait bidang agama adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama (TA.1) adalah meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang antara lain ditandai dengan:
 - a. meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia; dan
 - b. meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan.
2. Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis (TA.2) adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara lain dengan:
 - a. meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama; dan
 - b. meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar.
3. Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas (TA.3) adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, yang antara lain ditandai dengan:
 - a. meningkatnya Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan menjadi dalam memberikan layanan administrasi keagamaan pada masyarakat;
 - b. meningkatnya kapasitas penyebar kitab suci kepada umat beragama; dan
 - c. meningkatnya jumlah tempat ibadat yang terfasilitasi.
4. Sasaran terkait peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan (TA.4) adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, yang antara lain ditandai dengan:
 - a. meningkatnya pengelolaan dana zakat tahunan yang terhimpun; dan
 - b. meningkatnya persentase tanah wakaf yang bersertifikat.
5. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (TA.5) adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel, yang antara lain ditandai dengan:
 - a. meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji;
 - b. meningkatnya Predikat Opini Laporan Keuangan Haji;
 - c. meningkatnya pembimbing haji yang disertifikasi;
 - d. meningkatnya jumlah PIHK yang terakreditasi; dan
 - e. meningkatnya jumlah PPIU yang terakreditasi.
6. Sasaran terkait peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama (TA.6) adalah terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, yang ditunjukkan antara lain dengan:
 - a. dipertahankannya predikat opini laporan keuangan Kementerian Agama dengan predikat opini WTP;

- b. meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kementerian Agama;
- c. meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama; dan
- d. menurunnya persentase temuan audit terhadap pelaksanaan anggaran Kementerian Agama.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Agama terkait fungsi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu (TP.1) adalah meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang ditandai dengan:
 - a. jumlah siswa MI/Ulya/SDTK penerima manfaat KIP;
 - b. jumlah siswa MTs/Wustha/SMP TK penerima manfaat KIP; dan
 - c. jumlah siswa MA/Ulya/SMTK penerima manfaat KIP.
2. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan (TP.2) adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya APK RA;
 - b. meningkatnya APK MI/Ula;
 - c. meningkatnya APM MI/Ulya;
 - d. meningkatnya APK MTs/Wustha;
 - e. meningkatnya APM MTs/Wustha;
 - f. meningkatnya APK MA/Ulya;
 - g. meningkatnya APM MA/Ulya; dan
3. Sasaran terkait penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan (TP.3) adalah menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan, yang ditandai dengan:
 - a. menurunnya angka putus sekolah pada MI/Ula;
 - b. menurunnya angka putus sekolah pada MTs/Wustha; dan
 - c. menurunnya angka putus sekolah pada MA/Ulya/SMTK.
4. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan (TP.4) adalah meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B;
 - b. meningkatnya persentase MI yang terakreditasi minimal B;
 - c. meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B;
 - d. meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal B;
 - e. meningkatnya jumlah MI yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 - f. meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan

- g. meningkatnya jumlah MA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).
5. Sasaran terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (TP.5) adalah meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4;
 - b. meningkatnya persentase dosen berkualifikasi minimal S2;
 - c. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat; dan
 6. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas (TP.6) adalah meningkatnya proporsi guru agama yang profesional, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat;
 - b. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat;
 - c. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat;
 - d. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat;
 - e. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat; dan
 - f. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat.
 7. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas (TP.7) adalah meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah;
 - b. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen dalam wujud SDTK, SMPTK dan SMTK;
 - c. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik dalam wujud SMTK;
 - d. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu dalam wujud Pasraman;
 - e. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha dalam wujud Sekolah Minggu Buddha (SMB), Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma; dan
 - f. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Khonghucu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan	1	Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Islam yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan	92
		2	Jumlah Penyuluh dan Tenaga Teknis Keagamaan Kristen yang Difasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangannya	60
		3	Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan	25
		4	Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan	43
		5	Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan	50
		6	Persentase lembaga sosial keagamaan Islam yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya	5,69%
		7	Persentase lembaga sosial keagamaan Kristen yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya	2,18%
		8	Persentase lembaga sosial keagamaan Katolik yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya	1,09%
		9	Persentase lembaga sosial keagamaan Hindu yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya	2,75%
2	Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan	1	Persentase Pendidikan RA yang terakreditasi minimal B	3,75%
		2	Persentase Pendidikan MI yang terakreditasi minimal B	68,75%
		3	Persentase MTs yang terakreditasi minimal B	58,75%

		4	Persentase MA yang terakreditasi minimal B	58,75%
3	Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama	1	Persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4	83,00%
		2	Persentase guru RA-Madrasah bersertifikasi	13,89%
4	Meningkatnya ketersediaan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat	1	Persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat	80,20%
		2	Persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat	20,00%
		3	Persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat	80,00%
		4	Persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat	85,00%
		5	Persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat	11,20%
5	Meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama	1	Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam	266.095
		2	Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen	1.420
		3	Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik	1.200
		4	Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu (Pasraman)	23.755
		5	Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha (SMB, Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma)	770
6	Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	1	Nilai Reformasi Birokrasi	24,00
		2	Persentase temuan BPK, BPKP dan Itjen yang ditindaklanjuti	40,00%
7	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,00
		2	Persentase fasilitasi sarana dan prasarana Sekber FKUB yang memenuhi standar	30,00%
8	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1	Jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan	53
		2	Jumlah Rumah Ibadah Agama Islam yang Difasilitasi untuk Ditingkatkan Kualitas Pelayanannya	60

		3	Jumlah rumah ibadah Agama Kristen yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya	6
		4	Jumlah rumah ibadah Agama Katolik yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya	3
		5	Jumlah rumah ibadah Agama Hindu yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya	12
		6	Jumlah Kitab Suci Agama Islam yang didistribusikan	5000
		7	Jumlah Kitab Suci Agama Kristen yang didistribusikan	500
		8	Jumlah Kitab Suci Agama Katolik yang didistribusikan	500
		9	Jumlah Kitab Suci Agama Hindu yang didistribusikan	100
9	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan	1	Dana Zakat yang terhimpun (Triliun Rupiah)	0,028
		2	Persentase tanah wakaf bersertifikat	56,00%
10	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien, dan akuntabel	1	Indeks kepuasan jamaah haji	84,00%
		2	Jumlah jemaah haji yang dilayani.	3.654
		3	Jumlah pembimbing haji bersertifikat	100
11	Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP)	1	Jumlah siswa MI/Ula/SDTK	24.680
		2	Jumlah siswa MTs/Wustha/SMPTK	44.340
		3	Jumlah siswa MA/Ulya/SMTK	42.483
12	Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi	1	APK RA	8,48%
		2	APK MI/Ula	13,22%
		3	APM MI/Ula	10,82%
		4	APK MTs/Wustha	22,17%
		5	APM MTs/Wustha	18,18%
		6	APK MA/Ulya	8,81%
		7	APM MA/Ulya	6,10%
13	Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan	1	Angka putus sekolah MI/ULA	6,65%
		2	Angka putus sekolah MTs / Wustha	13,18%
		3	Angka putus sekolah MA/Ulya/SMTK	5,46%

No	Program	Anggaran
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	55.227.948.000,-
2	Kerukunan Umat Beragama	3.135.000.000,-
3	Bimbingan Masyarakat Islam	104.108.763.000,-
4	Pendidikan Islam	1.208.251.417.000,-
5	Bimbingan Masyarakat Kristen	3.149.768.000,-
6	Bimbingan Masyarakat Katolik	3.311.438.000,-
7	Bimbingan Masyarakat Hindu	13.891.150.000,-
8	Bimbingan Masyarakat Budha	9.345.000.000,-
9	Penyelenggaraan Haji dan Umroh	13.083.770.000,-
	Jumlah Seluruh	1.413.504.254.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN KETERSEDIAAN BIMBINGAN DAN FASILITASI KEAGAMAAN PADA TAHUN 2016

BIDANG BIMAS ISLAM

Pelaksanaan program Bimas Islam pada tahun anggaran 2016 telah selesai dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan tuntasnya pencapaian pada masing-masing program. Salah satu diantaranya jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Islam yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan penyuluh agama Islam.

- ❖ Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Islam yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan.
 - Bantuan Subsidi Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS Islam selama 1 Tahun untuk 40 Orang dengan dana sebesar Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) sesuai target yang dicapai sebesar 100%. Sehingga target dan realisasi pencapaian kinerja yang diukur dari tingkat capaian kelompok indikator Output dan outcomes sama 100%.
 - Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya masih jumlah yang sama yaitu 40 orang penyuluh dengan realisasi 100 %.
 - Dalam hal perbandingan realisasi kinerja saat ini dengan target jangka menengah, terdapat perubahan kebijakan bahwa penyuluh pada tahun 2017 dan seterusnya diseleksi di kabupaten kota yang seleksinya pada akhir tahun 2016.
 - Analisis penyebab keberhasilan dari terealisasinya bantuan subsidi tunjangan penyuluh agama Islam non pns dipengaruhi oleh kerjasama yang baik antara Bimas Islam dengan para penyuluh agama Islam non pns, dalam hal pengumpulan berkas dan pelaporan pertanggungjawaban penerima bantuan dan juga penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepenyuluhan di lapangan.
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari terealisasinya bantuan subsidi tunjangan penyuluh agama Islam non pns, telah memenuhi kriteria yang memadai khususnya dalam hal pelayanan kepada setiap obyek penyuluhan.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - ✓ Terdistribusinya penyuluh selain dikanwil terdapat juga di kabupaten/kota.
 - ✓ Kurangnya alokasi anggaran dan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kepenyuluhan.

BIMAS KRISTEN

Tenaga Penyuluh yang terbina

- ❖ Tunjangan Penyuluh Agama Kristen Non PNS
 - Bantuan Subsidi Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS Kristen selama 1 Tahun untuk 50 Orang dengan dana sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai target yang dicapai sebesar 100% dan terealisasi sebanyak 50 orang dengan dana sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) dengan pemberian tunjangan sebesar Rp. 3.600.000,- pertahun . Sehingga target dan realisasi pencapaian kinerja yang diukur dari tingkat capaian kelompok indikator Output dan outcome mencapai 100%.
 - Perbandingan Realisasi kinerja untuk Bantuan Subsidi Tunjangan penyuluh Agama Kristen Non PNS Tahun 2016 sebanyak 50 orang dengan dana sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan Puluh juta rupiah) sama dengan Tahun 2015 sebanyak 50 orang dengan dana sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah). Dilihat dari target dan realisasi pencapaian kinerja yang diukur sama tingkat capaian output dan outcomes yaitu sama-sama 100 %. sehingga terjadi peningkatan kinerja penyuluh, hal ini menyebabkan pelayanan dan pembinaan kepada umat semakin meningkat.
 - Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis bimas Kristen berkisar dari tahun 2015 s.d tahun 2019 menargetkan 250 orang dengan rincian sebagai berikut tahun 2015 target yang ingin di capai 50 orang, tahun 2016 dengan target 50 orang, tahun 2017 targetnya 50 orang

tahun 2018 targetnya 50 orang dan di Tahun 2019 targetnya 50 orang. dari perbandingan yang ingin di capai setiap tahun mengalami suatu peningkatan dan penambahan kuota jumlah penyuluh non pns hingga tercapainya target 250 orang di tahun 2019. Dengan adanya target tersebut diharapkan pencapaian kinerja dapat tercapai dengan maksimal.

- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Adapun penyebab adanya peningkatan kinerja penyuluh agama Kristen Non PNS tahun 2016 adalah mengalami suatu peningkatan dan keberhasilan dalam hal pembinaan dan pelayanan kepada umat Kristen, dan juga meningkatnya kerjasama/kemitraan Bimas Kristen dengan Majelis/Lembaga Keagamaan Kristen dalam rangka pembinaan kepada umat.
- Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya, adalah meningkatnya sumber daya manusia, tenaga teknis keagamaan Kristen.
- Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pernyataan Kinerja.
 1. Ketiadaan Struktur / Personal (penyuluh fungsional) di tingkat Kabupaten/Kota yang mengakibatkan kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan umat di Tingkat Kabupaten/Kota.
 2. Kurangnya tenaga penyuluh PNS di unit Bimas Kristen sebagai lading sektor pembinaan umat yang akan mengkoordinir tugas-tugas Penyuluh Agama Kristen Non PNS.
 3. Terbantunya dalam pendataan data umat Kristen.

BIMAS KATOLIK

Pelaksanaan program Bimas Katolik pada tahun anggaran 2016 telah selesai dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan tuntasnya pencapaian pada masing-masing program. Salah satu diantaranya jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan penyuluh agama Katolik.

- ❖ Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan.
 - Bantuan Subsidi Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS Katolik selama 1 Tahun untuk 21 Orang dengan dana sebesar Rp. 75.600.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sesuai target yang dicapai sebesar 100% dan terealisasi sebanyak 21 orang dengan dana sebesar Rp. 75.600.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan pemberian tunjangan sebesar Rp. 3.600.000,- pertahun . Sehingga target dan realisasi pencapaian kinerja yang diukur dari tingkat capaian kelompok indikator Output dan outcomes sama 100%.
 - Perbandingan Realisasi kinerja untuk Bantuan Subsidi Tunjangan penyuluh agama Katolik Non PNS Tahun 2016 sebanyak 21 orang dengan dana sebesar Rp. 75.600.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sama dibandingkan dengan Tahun 2015 sebanyak 21 orang dengan dana sebesar Rp.75.600.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Dilihat dari target dan realisasi pencapaian kinerja yang diukur sama tingkat capaian output dan outcomes yaitu sama-sama 100 %.
 - Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis bimas Katolik berkisar dari tahun 2015 s.d tahun 2019 menargetkan 50 orang. Dengan rincian sebagai berikut tahun 2015 target yang ingin di capai 21 orang, tahun 2016 dengan target 21 orang, tahun 2017 targetnya 20 orang tahun 2018 targetnya 40 orang dan di Tahun 2019 targetnya 50 orang. Dari perbandingan yang ingin di capai setiap tahun mengalami suatu peningkatan dan penambahan kuota jumlah penyuluh non pns hingga tercapainya target 50 orang di tahun 2019.
 - Analisis penyebab keberhasilan dari terealisasinya bantuan subsidi tunjangan penyuluh agama Katolik non pns dipengaruhi oleh kerjasama yang baik antara Bimas Katolik dengan para penyuluh agama Katolik non pns, dalam hal

pengumpulan berkas dan pelaporan pertanggungjawaban penerima bantuan dan juga penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepenyuluhan di lapangan.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari terealisasinya bantuan subsidi tunjangan penyuluh agama Katolik non pns, telah memenuhi kriteria yang memadai khususnya dalam hal pelayanan kepada setiap obyek penyuluhan.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - ❖ Tidak adanya struktur di kabupaten/kota, sehingga koordinasi untuk semua sektor program kerja tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
 - ❖ Kurangnya tenaga penyuluh agama Katolik non pns yang tersebar di kabupaten/kota.
 - ❖ Kurangnya alokasi anggaran dan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kepenyuluhan.

BIDANG BIMAS HINDU

- ❖ Tunjangan Penyuluh Agama Hindu Non PNS
 - Bantuan Subsidi Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS Hindu selama 1 Tahun untuk 40 Orang dengan dana sebesar Rp. 144.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta rupiah) sesuai target yang dicapai sebesar 100% dan terealisasi sebanyak 40 orang dengan dana sebesar Rp. 144.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta rupiah) dengan pemberian tunjangan sebesar Rp. 3.600.000,- pertahun . Sehingga target dan realisasi pencapaian kinerja yang diukur dari tingkat capaian kelompok indikator Output dan outcomes sama 100%.
 - Perbandingan Realisasi kinerja untuk Bantuan Subsidi Tunjangan penyuluh Agama Hindu Non PNS Tahun 2016 sebanyak 40 orang dengan dana sebesar Rp. 144.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta rupiah) sama dibandingkan

dengan Tahun 2015 sebanyak 40 orang dengan dana sebesar Rp. 144.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta rupiah). Dilihat dari target dan realisasi pencapaian kinerja yang diukur sama tingkat capaian output dan outcomes yaitu sama-sama 100 %. Dan Tahun 2016 terdapat kuota jumlah penyuluh non pns yang sama yaitu sebanyak 40 orang sehingga terjadi konsistensi kinerja penyuluh, hal ini menyebabkan pelayanan dan pembinaan kepada umat sama disamping juga ditambah dengan kinerja penyuluh PNS Hindu sebanyak 3 orang.

- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis bimas Hindu berkisar dari tahun 2015 s.d tahun 2019 menargetkan 100 orang dengan rincian sebagai berikut tahun 2015 target yang ingin di capai 35 orang, tahun 2016 dengan target 40 orang, tahun 2017 targetnya 50 orang tahun 2018 targetnya 60 orang dan di Tahun 2019 targetnya 70 orang. Dari perbandingan yang ingin di capai setiap tahun mengalami suatu peningkatan dan penambahan kuota jumlah penyuluh non pns hingga tercapainya target 100 orang di tahun 2019. Dengan adanya target tersebut diharapkan pencapaian kinerja dapat tercapai.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Adapun penyebab adanya peningkatan kinerja penyuluh agama Hindu non pns tahun 2016 adalah mengalami suatu peningkatan dan keberhasilan dalam hal pembinaan dan pelayanan kepada umat Hindu, meningkatnya kerjasama/kemitraan Bimas Hindu dengan Majelis/Lembaga Keagamaan Hindu dalam rangka pembinaan kepada umat disamping itu meningkatkan kualitas pelayanan penyuluh agama Hindu. Selain itu juga adanya peningkatan dari segi pelaporan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh para

penyuluh yang semakin terinci dengan melampirkan dokumen pendukungnya.

- Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya, Dalam hal meningkatnya sumber daya manusia, tenaga teknis keagamaan Hindu .

Adapun Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya, Dalam hal meningkatnya sumber daya manusia, tenaga teknis keagamaan Hindu yaitu adanya efisiensi terhadap penggunaan dana kegiatan bidang Hindu tahun 2016.

- Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pernyataan Kinerja.

4. Ketiadaan Struktur / Personal (penyuluh fungsional) di tingkat 8 Kabupaten/Kota yang mengakibatkan kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan umat di Tingkat 8 Kabupaten/Kota.

5. Kurangnya tenaga penyuluh PNS di unit Bimas Hindu yang hanya berjumlah 3 orang sebagai leading sektor pembinaan umat yang akan mengkoordinir tugas-tugas penyuluh non PNS.

6. Letak geografis dari 10 kabupaten kota se NTB yang jauh menyebabkan koordinasi penyuluh mengalami kesulitan.

7. Untuk keberhasilan ditunjang dengan adanya pemberian pelatihan dan pembinaan berupa orientasi kepada para penyuluh non PNS Hindu.

BIMAS BUDHA

Pelaksanaan program Bimas Buddha pada tahun anggaran 2016 telah selesai dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan tuntasnya pencapaian pada masing-masing program. Salah satu diantaranya jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan penyuluh agama Buddha.

- ❖ Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan.

- Bantuan Subsidi Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS Buddha selama 1 Tahun untuk 33 Orang dengan dana sebesar Rp. 118.800.000,- (Seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai target yang dicapai sebesar 100% dan terealisasi sebanyak 33 orang dengan dana sebesar Rp. 118.800.000,- (Seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pemberian tunjangan sebesar Rp. 3.600.000,- pertahun . Sehingga target dan realisasi pencapaian kinerja yang diukur dari tingkat capaian kelompok indikator Output dan outcomes sama 100%.
- Perbandingan Realisasi kinerja untuk Bantuan Subsidi Tunjangan penyuluh Agama Buddha Non PNS Tahun 2016 sebanyak 33 orang dengan dana sebesar Rp. 118.800.000,- (Seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tidak sama dibandingkan dengan Tahun 2015 sebanyak 25 orang dengan dana sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).Dilihat dari target dan realisasi pencapaian kinerja yang diukur sama tingkat capaian output dan outcomes yaitu sama-sama 100 %. Namun Tahun 2016 terdapat penambahan kuota jumlah penyuluh non pns sebanyak 8 orang sehingga terjadi peningkatan kinerja penyuluh, hal ini menyebabkan pelayanan dan pembinaan kepada umat semakin meningkat disamping juga membantu kinerja penyuluh PNS.
- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis bimas buddha berkisar dari tahun 2015 s.d tahun 2019 menargetkan 200 orang dengan rincian sebagai berikut tahun 2015 target yang ingin di capai 30 orang, tahun 2016 dengan target 35 orang, tahun 2017 targetnya 45 orang tahun 2018 targetnya 45 orang dan di Tahun 2019 targetnya 50 orang. Dari perbandingan yang ingin di capai setiap tahun mengalami suatu peningkatan dan penambahan kuota jumlah penyuluh non pns hingga tercapainya target 200 orang di tahun

2019..Dengan adanya target tersebut diharapkan pencapaian kinerja dapat tercapai.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Adapun penyebab adanya peningkatan kinerja penyuluh agama Buddha non pns tahun 2016 adalah mengalami suatu peningkatan dan keberhasilan dalam hal pembinaan dan pelayanan kepada umat Buddha, meningkatnya kerjasama/kemitraan Bimas Buddha dengan Majelis/Lembaga Keagamaan Buddha dalam rangka pembinaan kepada umat disamping itu meningkatkan kualitas pelayanan penyuluh agama Buddha.

- Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya, Dalam hal meningkatnya sumber daya manusia, tenaga teknis keagamaan Buddha.
- Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pernyataan Kinerja.

8. Ketiadaan Struktur / Personal (penyuluh fungsional) di tingkat Kabupaten/kota yang mengakibatkan kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan umat di Tingkat Kabupaten/Kota.

9. Kurangnya tenaga penyuluh PNS di unit Bimas Buddha sebagai lading sektor pembinaan umat yang akan mengkoordinir tugas-tugas penyuluh non PNS.

10. Terbantunya dalam pendataan data umat Buddha.

PRESENTASE LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN YANG DIFASILITASI UNTUK DITINGKATKAN KUALITAS PELAYANANNYA.

BIDANG BIMAS ISLAM

Pelaksanaan program Bimas Islam pada tahun anggaran 2016 telah selesai dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan tuntasnya pencapaian pada masing-masing program. Salah satu diantaranya adalah peningkatan kualitas pelayanan dan presentase lembaga sosial keagamaan.

- ✓ Presentase lembaga sosial keagamaan Islam yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya.
 - Target peningkatan kualitas dan pelayanan kepada lembaga sosial keagamaan Islam telah direalisasikan secara menyeluruh untuk semua lembaga keagamaan yang telah dialokasikan untuk mendapatkan bantuan.
 - Perbandingan Realisasi kinerja untuk bantuan peningkatan kualitas pelayanan keagamaan untuk tahun 2016 sebanyak 50 lembaga. tidak sama dengan tahun 2015 sebanyak 6 lembaga.
 - Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis bimas Islam berkisar dari tahun 2015 s.d tahun 2019 menargetkan 250 lembaga keagamaan untuk ditingkatkan lembaga pelayanan dalam urusan keagamaan. Dengan rincian sebagai berikut tahun 2015 target yang ingin di capai 50 lembaga yang dialokasikan dalam DIPA 6 lembaga tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Tahun 2016 dengan target 50 lembaga sesuai dengan yang dialokasikan dalam DIPA sejumlah 50 lembaga. Untuk tahun 2017 dari target 50 yang teralokasi dalam dipa sejumlah 24 lembaga. Untuk 2018, 2019 masing target pertahun 50 lembaga. Dari perbandingan yang ingin di capai setiap tahun mengalami perubahan. Hal ini akan berdampak pada pelayanan yang berkualitas dan prima kepada semua lembaga keagamaan Islam.
 - Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dari terealisasinya bantuan yang diberikan kepada lembaga keagamaan Islam adalah sebagai berikut: Dari segi keberhasilan ada hasil ataupun outcome yang positif dalam memberikan bantuan kepada lembaga keagamaan Islam yang difasilitasi. Sedangkan dari segi kegagalan adalah bantuan yang ditargetkan pada awal tahun menjadi sangat berkurang jika dibandingkan dengan lembaga yang mengusulkan bantuan.
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari terealisasinya bantuan kepada lembaga keagamaan Islam, telah memenuhi kriteria yang memadai khususnya dalam hal pelayanan kepada setiap lembaga keagamaan yang difasilitasi.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- ✓ Alokasi anggaran untuk lembaga keagamaan Islam sering berubah sehingga untuk mencapai target sesuai harapan masih perlu perbaikan dalam hal penetapan jumlah bantuan.

BIMAS KRISTEN

Lembaga Sosial Keagamaan Kristen yang difasilitasi

- Kegiatan ini berupa bantuan dana tunai sebesar Rp. 10.000.000 (@ Rp. 5.000.000) yang diberikan (melalui transfer rekening) kepada 2 (dua) lembaga Sosial keagamaan Kristen yakni Forum Komunikasi Gereja-gereja Kristen (FKGK) Prov. NTB dan Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII) Prov. NTB. Dengan demikian realisasi anggaran dari kegiatan ini mencapai 100 %
- Perbandingan Realisasi kinerja untuk Bantuan Lembaga Sosial Keagamaan Kristen Tahun 2016 sebanyak 2 Lembaga Keagamaan Kristen dengan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sama dengan Tahun 2015 sebanyak 2 (dua) Lembaga Keagamaan Kristen dengan dana sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Dilihat dari target dan realisasi pencapaian kinerja yang diukur sama tingkat capaian output dan outcomes yaitu sama-sama 100 %. sehingga terjadi peningkatan kinerja Lembaga Sosial Keagamaan Kristen, hal ini menyebabkan pelayanan dan pembinaan kepada umat semakin meningkat.
- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis bimas Kristen berkisar dari tahun 2015 s.d tahun 2019 menargetkan 20 Lembaga Sosial Keagamaan Kristen dengan rincian sebagai berikut tahun 2015 target yang ingin di capai 2 Lembaga Sosial Keagamaan Kristen, tahun 2016 dengan target 3 Lembaga Sosial Keagamaan Kristen, tahun 2017 targetnya 4 Lembaga Sosial

Keagamaan Kristen tahun 2018 targetnya 5 Lembaga Sosial Keagamaan Kristen dan di Tahun 2019 targetnya 6 Lembaga Sosial Keagamaan Kristen. dari perbandingan yang ingin di capai setiap tahun mengalami suatu peningkatan dan penambahan kuota jumlah Lembaga Sosial Keagamaan Kristen hingga tercapainya target 20 Lembaga Sosial Keagamaan Kristen di tahun 2019. Dengan adanya target tersebut diharapkan pencapaian kinerja dapat tercapai dengan maksimal.

- Adapun penyebab adanya peningkatan kinerja Lembaga Sosial Keagamaan Kristen tahun 2016 adalah mengalami suatu peningkatan dan keberhasilan dalam hal Oprasional pelayanan kepada umat Kristen.
- Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya, adalah meningkatnya sumber daya manusia, tenaga teknis keagamaan Kristen.
- Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pernyataan Kinerja. adalah Meningkatnya kerjasama/kemitraan Bimas Kristen dengan Majelis/Lembaga Sosial Keagamaan Kristen dalam rangka pembinaan kepada umat.

BIMAS KATOLIK

Pelaksanaan program Bimas Katolik pada tahun anggaran 2016 telah selesai dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan tuntasnya pencapaian pada masing-masing program. Salah satu diantaranya adalah peningkatan kualitas pelayanan dan presentase lembaga sosial keagamaan.

- ✓ Presentase lembaga sosial keagamaan Katolik yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya.
 - Target peningkatan kualitas dan pelayanan kepada lembaga sosial keagamaan Katolik telah direalisasikan secara menyeluruh untuk semua lembaga keagamaan yang telah dialokasikan untuk mendapatkan bantuan. Adapun bentuk bantuan yaitu bantuan untuk kelompok kategorial

sebanyak 2 kelompok diberikan kepada kelompok: Marriage Encounter (ME) NTB dan kelompok: Legio Maria Mataram. Target semula lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya sebesar 2 kelompok atau setara 100% sesuai dengan target yang direncanakan dan realisasinya pun sama yaitu sebanyak 2 kelompok atau setara 100%.

- Perbandingan Realisasi kinerja untuk bantuan peningkatan kualitas pelayanan keagamaan untuk tahun 2016 sebanyak 2 kelompok keagamaan tidak sama dengan tahun 2015 sebanyak 4 kelompok keagamaan. Hal ini disebabkan karena pagu alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan keagamaan untuk tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015.
- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis bimas Katolik berkisar dari tahun 2015 s.d tahun 2019 menargetkan 10 lembaga keagamaan untuk ditingkatkan lembaga pelayanan dalam urusan keagamaan. Dengan rincian sebagai berikut tahun 2015 target yang ingin di capai 4 lembaga yang dialokasikan dalam DIPA sesuai dengan yang ditargetkan, tahun 2016 dengan target 6 lembaga tidak sesuai dengan yang dialokasikan dalam DIPA hanya 2 lembaga, tahun 2017 targetnya 8 lembaga tidak sesuai dengan yang dialokasikan dalam DIPA hanya 1 lembaga, tahun 2018 targetnya 9 lembaga dan di Tahun 2019 targetnya 10 lembaga. Dari perbandingan yang ingin di capai setiap tahun mengalami suatu penurunan kuota jumlah lembaga keagamaan Katolik yang harus memperoleh peningkatan kualitas pelayanannya. Hal ini akan berdampak pada pelayanan yang berkualitas dan prima kepada semua lembaga keagamaan Katolik.
- Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dari terealisasinya bantuan yang diberikan kepada lembaga

keagamaan Katolik adalah sebagai berikut: Dari segi keberhasilan ada hasil ataupun outcome yang positif dalam memberikan bantuan kepada lembaga keagamaan Katolik yang difasilitasi. Sedangkan dari segi kegagalan adalah bantuan yang ditargetkan pada awal tahun menjadi sangat berkurang jumlahnya sehingga bantuan tersebut diberikan lebih kecil karena banyaknya lembaga keagamaan Katolik yang mengajukan permohonan.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari terealisasinya bantuan kepada lembaga keagamaan Katolik, telah memenuhi kriteria yang memadai khususnya dalam hal pelayanan kepada setiap lembaga keagamaan yang difasilitasi.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- ✓ Alokasi lembaga keagamaan Katolik yang mendapatkan bantuan dalam DIPA tidak sesuai dengan jumlah lembaga keagamaan Katolik yang ada. Hal ini tentu berdampak terhadap pelayanan untuk semua lembaga keagamaan Katolik yang seharusnya difasilitasi untuk mendapatkan bantuan

BIDANG BIMAS HINDU

b. Lembaga agama dan keagamaan Hindu yang terbina

- Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
 - Bantuan Operasional PHDI Tk. Kab./Kota untuk 3 Lokasi dengan dana sebesar Rp 10.000.000,- (spuluh juta) perlokasi sehingga total anggarannya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta). Bantuan tersebut telah disalurkan kepada lembaga penerima bantuan sebesar Rp 10.000.000,- (spuluh juta) perlokasi untuk memperlancar kegiatan lembaga dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator inputs 100%, output 100%, dan outcomes 100%

- Bantuan Operasional LPDG Provinsi NTB Tk. Provinsi untuk 1 Lokasi dengan dana sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Bantuan tersebut telah disalurkan kepada lembaga penerima bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk memperlancar kegiatan lembaga dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator inputs 100%, output 100%, dan outcomes 100%.
- Bantuan Rumah Ibadah Hindu untuk 5 Lokasi dengan dana sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perlokasi sehingga total anggarannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bantuan tersebut telah disalurkan kepada lembaga penerima bantuan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perlokasi untuk memperlancar kegiatan lembaga dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator inputs 100%, output 100%, dan outcomes 100%.
- Bantuan sarana keagamaan untuk 50 buah dengan dana sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bantuan tersebut telah disalurkan kepada 50 orang penerima bantuan masing-masing yaitu 25 buah genta dan 25 buah pakaian pemangku yang total anggarannya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk memperlancar kegiatan lembaga dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator inputs 100%, output 100%, dan outcomes 100%.
- Pembinaan dan pengembangan Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Pembinaan dan pengembangan Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu Jumlah Peserta 50 Orang dengan dana sebesar Rp. 116.125.000,- (Seratus enam belas Juta seratus dua puluh lima Rupiah). Pelaksanaan Pembinaan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan juga adanya efisiensi dana sebesar Rp. 5.850.000,- (Lima Juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah). dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator inputs 95%, Output 100%, dan outcomes 95%.

BIMAS BUDHA

Pelaksanaan program Bimas Buddha pada tahun anggaran 2016 telah selesai dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan tuntasnya pencapaian pada masing-masing program. Salah satu diantaranya adalah peningkatan kualitas pelayanan dan presentase lembaga sosial keagamaan.

- ✓ Presentase lembaga sosial keagamaan Buddha yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya.
 - Target peningkatan kualitas dan pelayanan kepada lembaga sosial keagamaan Buddha telah direalisasikan secara menyeluruh untuk semua lembaga keagamaan yang telah dialokasikan untuk mendapatkan bantuan. Adapun lembaga yang menerima bantuan sebanyak 3 lembaga agama dan keagamaan Buddha yang terdiri dari bantuan organisasi Wanita Tk. Prov./Kab./Kota, (2 lokasi) bantuan Lembaga Adat Umat Buddha (1 lokasi) dan bantuan Organisasi Pemuda Buddhis (2 lokasi) sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) masing-masing menerima bantuan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) per lokasi. Target semula lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya sebesar 3 lembaga atau setara 100% sesuai dengan target yang direncanakan dan realisasinya pun sama yaitu sebanyak 3 lembaga atau setara 100%.
 - Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha Tahun 2016 bantuan diberikan kepada 3 lembaga dengan dana sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan Tahun 2015 bantuan diberikan kepada 3 lembaga sosial keagamaan dengan dana sebesar Rp.271.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta

Rupiah). Dilihat dari target dan realisasi pencapaian kinerja yang diukur sama tingkat capaian output dan outcomes yaitu sama-sama 100 %. Tetapi tahun 2016 mengalami penurunan anggaran sebesar Rp.146.000.000,-, hal ini disebabkan karena pagu alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan keagamaan untuk tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015.

- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis bimas buddha berkisar dari tahun 2015 s.d tahun 2019 menargetkan 55 lembaga untuk ditingkatkan lembaga pelayanan dalam urusan keagamaan. yang terbantu dengan masing-masing setiap tahun target yang ingin dicapai adalah sama sebanyak 11 lembaga bantuan. Dari perbandingan yang ingin di capai untuk alokasi anggaran pada setiap tahunnya mengalami penurunan dan peningkatan hal ini disebabkan karena alokasi anggaran harus menyesuaikan dengan pagu anggaran Eselon I yang diberikan oleh pusat. Dari perbandingan yang ingin di capai setiap tahun target yang direncanakan adalah sama akan tetapi anggaran yang dilokasikan setiap tahun mengalami penurunan maupun peningkatan dari kuota jumlah lembaga keagamaan yang dibantu. Hal ini akan berdampak pada pelayanan yang berkualitas kepada semua lembaga keagamaan Buddha.
- Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dari terealisasinya bantuan yang diberikan kepada lembaga keagamaan Buddha adalah sebagai berikut: Dari segi keberhasilan ada hasil ataupun outcome yang positif dalam memberikan bantuan kepada lembaga keagamaan Buddha yang difasilitasi. Sedangkan dari segi kegagalan adalah bantuan yang ditargetkan pada awal tahun menjadi sangat berkurang jumlahnya sehingga bantuan tersebut diberikan lebih kecil karena banyaknya lembaga keagamaan Buddha yang mengajukan permohonan tidak dapat tercapai.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari terealisasinya bantuan kepada lembaga keagamaan Buddha telah memenuhi kriteria yang memadai khususnya dalam hal pelayanan kepada setiap lembaga keagamaan yang difasilitasi.

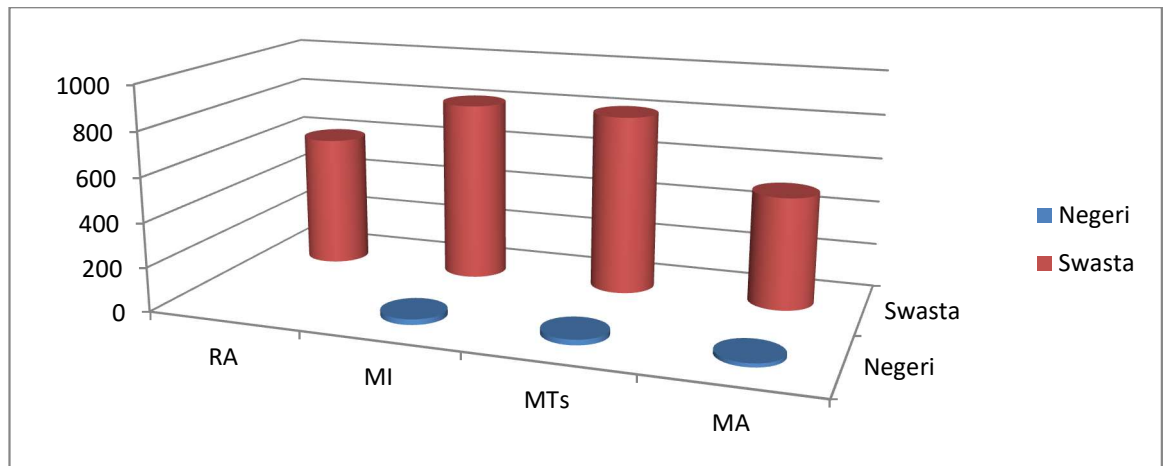
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Alokasi lembaga keagamaan Buddha yang mendapatkan bantuan dalam DIPA tidak sesuai dengan jumlah lembaga keagamaan Buddha yang ada. Hal ini tentu berdampak terhadap pelayanan untuk semua lembaga keagamaan Buddha yang seharusnya difasilitasi untuk mendapatkan bantuan

2. PRESENTASE PENDIDIKAN RA/MI/MTS/MA TERAKREDITASI MINIMAL B

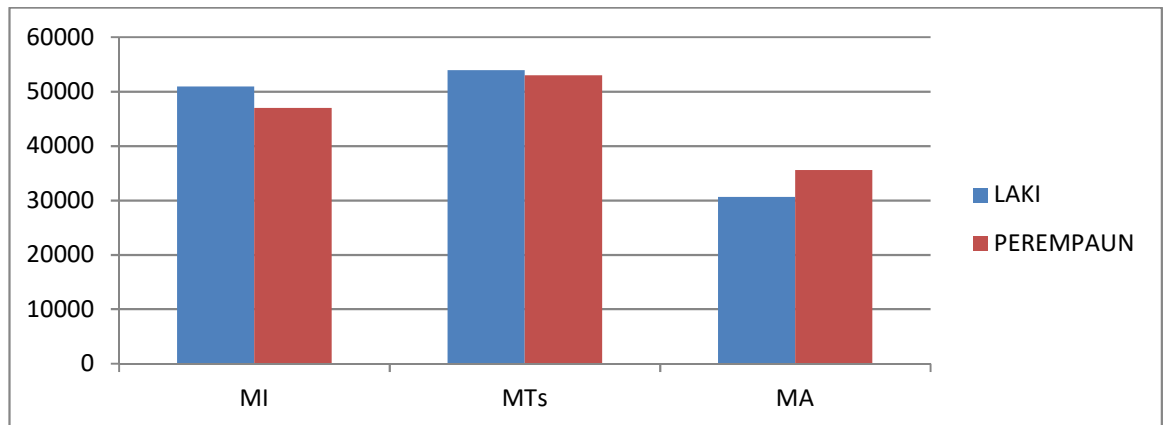
A. Capaian Kinerja

Salah satu upaya meningkatkan akses pendidikan adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta melaksanakan pendidikan melalui pendirian madrasah swasta. Selain itu, Kementerian Agama juga melakukan penegerian terhadap madrasah-madrasah swasta yang memenuhi syarat. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah secara kuantitatif telah mendorong kemajuan lembaga pendidikan ini. Pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan madrasah dari pendidikan anak usia dini (Raudlatul Athfal dan Bustanul Athfal), pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah), dan Pendidikan Menengah (Madrasah Aliyah) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data EMIS Pendidikan Madrasah, hingga tahun 2016 jumlah madrasah swasta jauh melebihi madrasah negeri. Jumlah Raudlatul Athfal sebanyak 600 lembaga, Madrasah Ibtidaiyah swasta sebanyak 813 lembaga sementara Madrasah Ibtidaiyah negeri sebanyak 25 lembaga, Madrasah Tsanawiyah swasta sebanyak 808 lembaga sedangkan Madrasah Tsanawiyah negeri sebanyak 24 lembaga, dan Madrasah Aliyah Swasta sebanyak 506 lembaga sedangkan Madrasah Aliyah Negeri 17 lembaga. Total jumlah Raudlatul Athfal dan madrasah seluruhnya sebanyak 2.793 lembaga. Perbandingan jumlah madrasah berdasarkan status ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Dari grafik tersebut dapat dilihat jumlah madrasah swasta lebih dari 90 %. Hal menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Nusa Tenggara Barat sangat besar dalam pembangunan masyarakat melalui lembaga pendidikan.

Selain itu dapat disajikan jumlah siswa pada masing-masing jenjang lembaga pendidikan baik madrasah negeri maupun swasta dapat diuraikan sebagai berikut : Jumlah siswa Madrasah Ibtidaiyah laki-laki sebanyak 50.925 siswa, perempuan 46.963 jumlah seluruhnya 97.888 siswa, adapun jumlah siswa Madrasah Tsanawiyah laki-laki sebanyak 53.937 siswa, perempuan 52.978 siswa, jumlah seluruhnya 106.915 siswa dan jumlah siswa Madrasah Aliyah laki-laki sebanyak 30.601 siswa, perempuan 35.593 siswa, jumlah seluruhnya sebanyak 66.194 siswa. Perbandingan jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin pada masing-masing jenjang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

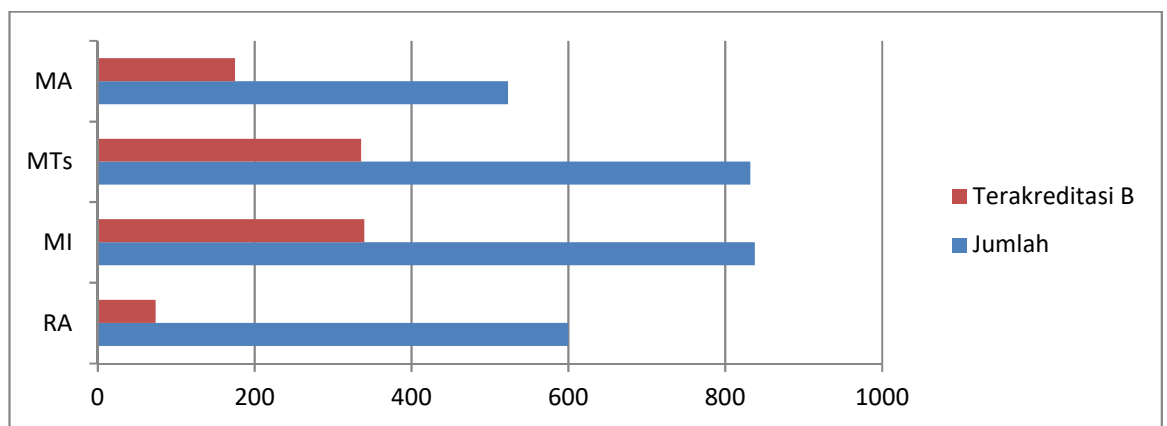


Adapun jumlah RA dan madrasah yang terakreditasi dapat di sajikan sebagai berikut :

No.	Status Akreditasi		
	A	B	C
Raudlatul Athfal	8	74	73

Madrasah Ibtida'iyah	18	340	223
Madrasah Tsanawiyah	41	336	161
Madrasah Aliyah	21	175	116

Berdasarkan rencana strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja pejabat yang menangani akreditasi lembaga pendidikan bahwa pada tahun 2016 RA dan madrasah harus terakreditasi minimal "B" dengan prosentase sebagai berikut, RA 3,75 %, MI 68,75 %, MTs 58,75% dan MA 58,75 %. Adapun capaian kinerja dari target yang ditentukan dapat dilihat dengan cara membandingkan jumlah lembaga pendidikan dengan status akreditasi "B" pada masing-masing jenjang pendidikan. Secara prosentase dapat dilihat pada grafik berikut :



Bila melihat grafik diatas, maka dapat diprosentasekan status lembaga yang akreditasi B sebagaimana target yang ditetapkan yakni lembaga RA 12%, MI 41%, MTs. 40% dan MA 33%.

B. Faktor Pendukung

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan umum berciri agama antara lain:

1. Besarnya peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pendidikan umum berciri agama seperti RA/BA, madrasah, dan pendidikan tinggi keagamaan;
2. Kualitas pembelajaran di madrasah secara umum dapat mengimbangi kualitas pembelajaran di sekolah umum, yang ditunjukkan oleh persentase kelulusan siswa madrasah dalam Ujian Nasional yang menyamai, dan bahkan sebagiannya, melampaui persentase kelulusan siswa sekolah umum;
3. Adanya kebijakan nasional yang memposisikan pendidikan madrasah setara dengan pendidikan pada sekolah umum;
4. Mutu lembaga pendidikan tinggi keagamaan, meski baru dalam jumlah kecil, menunjukkan peningkatan dan semakin diakui secara internasional;

5. Lembaga pendidikan tinggi keagamaan khususnya universitas keagamaan telah menjadi wadah bagi jejaring internasional dengan universitas dan lembaga pendidikan tinggi yang lain di seluruh belahan dunia; dan
6. Tersedianya sumber daya internasional yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi keagamaan, baik berupa ketersediaan beasiswa bagi mahasiswa dan dosen, program pertukaran, kerjasama riset, dan sebagainya.

Adapun sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan umum berciri agama antara lain adalah:

1. Penyelenggaraan pendidikan umum berciri agamaseperti RA/BA, madrasah dan pendidikan tinggi keagamaan yang mayoritas dikelola oleh masyarakat/swasta dapat menimbulkan masalah terkait upaya koordinasi dan standardisasi pelayanan pendidikan umum berciri agama;
2. Sebaran madrasah masih sangat terkonsentrasi pada sedikit provinsi sehingga layanan pendidikan madrasah belum dapat menjangkau wilayah-wilayah lain yang membutuhkan, khususnya di wilayah tertinggal, terpencil dan terluar (3T);
3. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan;
4. Masih terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas baik dari segi jumlah maupun ketersebarannya;
5. Masih lemahnya kualitas manajemen dan masih terbatasnya ketersediaan pimpinan yang profesional pada satuan pendidikan umum berciri agama;
6. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan madrasah yang dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan;
7. Masih terbatasnya kemampuan Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung seluruh lembaga PTK swasta atau dalam melakukan monitoring agar lembaga PTK memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, baik akibat minimnya dukungan anggaran maupun tidak begitu jelasnya mandat dan struktur kelembagaan Kopertais diatur dalam peraturan perundangan yang ada;
8. Masih rendahnya sebagian besar kualitas hasil riset dan masih rendahnya kuantitas publikasi internasional hasil riset dan karya akademis lainnya; dan
9. Masih rendahnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan.

C. Faktor Penghambat Pendidikan Keagamaan

Adapun sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan keagamaan antara lain:

1. Tidak mudahnya upaya koordinasi dan standarisasi pendidikan keagamaan akibat penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagian besar dikelola swasta;
2. Masih rendahnya kualifikasi dan mutu tenaga pendidik pada lembaga pendidikan keagamaan;
3. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas;
4. Masih belum jelasnya standar yang tersedia untuk menilai mutu kelembagaan maupun kualitas capaian lembaga pendidikan keagamaan;
5. Masih belum ada standarisasi yang memadai dalam penyusunan kurikulum diantara penyelenggara pendidikan keagamaan;
6. Masih terbatasnya kerangka regulasi untuk mendukung pengembangan pelebagaan pendidikan keagamaan; dan
7. Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan keagamaan; dan
8. Terkait dengan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Khonghucu, belum adanya kurikulum terstandar, masih terbatasnya jumlah guru agama Khonghucu, masih belum tersedianya standarisasi kompetensi guru agama Khonghucu, serta belum tersedianya data yang lengkap mengenai jumlah siswa dan guru agama, serta lembaga pendidikan agama Khonghucu di Indonesia.

D. Potensi Permasalahan

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, mulai jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, antara lain:

1. Adanya kerangka regulasi yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
2. Meningkatnya jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berperan sebagai penyedia tenaga pendidik di bidang pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
3. Keberadaan forum-forum yang dapat menjadi wadah kerjasama dan saling tukar pengetahuan dan pengalaman di kalangan tenaga pendidikan agama, seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama pada masing-masing agama.

Adapun masalah-masalah yang dapat menjadi kendala bagi peningkatan mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum antara lain:

1. Kebutuhan akan guru dan dosen pendidikan agama pada satuan pendidikan umum belum sepenuhnya tercukupi;
2. Masih ada sekolah dan perguruan tinggi yang tidak menyediakan guru dan dosen pendidikan agama sesuai dengan kebutuhan pendidikan agama yang dianut peserta didik;
3. Belum tersedia standar untuk menilai capaian mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
4. Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidikan agama yang berkualitas;
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
6. Masih rendahnya sebagian mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menjadi penyedia kebutuhan akan tenaga pendidikan agama;
7. Masih belum efektifnya peran forum-forum seperti KKG dan MGMP Pendidikan Agama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
8. Masih kurangnya jumlah Pengawas PAI serta Pengawas yang ada masih perlu ditingkatkan kompetensinya;
9. Kebutuhan bahan ajar yang perlu ditingkatkan; dan
10. Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum.

3. PENINGKATAN PROPORSI PENDIDIK YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL PADA PENDIDIKAN UMUM BERCIRI KHAS AGAMA

4. PENINGKATAN PROPORSI PENDIDIK YANG BERKOMPETEN DAN PROFESIONAL PADA PENDIDIKAN UMUM BERCIRI KHAS AGAMA

GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

- A. Peningkatan ketersediaan guru pendidikan agama Islam yang bersertifikat

Pada tahun 2016, persentase target guru-guru pendidikan agama islam yang bersertifikat mencapai 91, 26%. Dimana jumlah guru agama islam sebanyak 4.226 guru, dan guru yang sudah tersertifikat sebanyak 3.244 orang atau sebesar 76,76 %. Sedangkan jumlah guru PAI yang memiliki

masa kerja dibawah tahun 2005 sebanyak 2.437 orang dengan status telah tersertifikasi sebanyak 3.244 guru (100 %) dan jumlah guru PAI yang telah bersertifikasi PAI sebanyak 2.225 orang guru atau 91.30 %. Pada tahun 2017, target pencapaian guru-guru PAI yang telah bersertifikasi PAI sebanyak 100 %.

GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

B. Peningkatan ketersediaan guru pendidikan agama Kristen yang bersertifikat

- Ketersediaan Guru PAK PNS dan Non PNS di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Berjumlah 70 (tujuh puluh) orang yakni yang sudah memiliki sertifikat Tunjangan Profesi Guru berjumlah 16 (enam belas) orang diantaranya yang dapat menerima Tunjangan Profesi Guru adalah yang memenuhi persyaratan yang tertera dalam perundang - undang yang berlaku dalam proses pembayaran TPG tersebut.
- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016 adalah Guru PAK PNS dan Non PNS yang dapat menerima TPG adalah Guru PAK yang sudah memiliki sertifikat Tunjangan Profesi Guru, yakni Guru PAK PNS dan Non PNS yang dapat menerima Tunjangan Profesi Guru berjumlah 14 (empat belas) orang, yang mana tidak sama dengan Target dan Realisasi pada Tahun 2015, jumlah Guru PAK PNS dan Non PNS yang menerima TPG sebanyak 16 (enam belas) orang dengan target capaian kinerja yang maksimal dengan jumlah Kuota Guru PAK PNS dan Non PNS yang sudah memiliki Sertifikat pada Tahun 2015, Dilihat dari target dan realisasi pencapaian kinerja yang diukur tidak sama tingkat capaian output dan outcomes yaitu capaian kinerja di tahun 2015 adalah 97,89% dan di tahun 2016 82,91%. sehingga terjadi penurunan kinerja pada realisasi Proses pembayaran TPG Guru PAK PNS dan Non PNS tersebut, hal ini terjadi karena berkurangnya Jumlah JPL di Sekolah Guru Pendidikan Agama Kristen yang memiliki Sertifikat tersebut.
- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis bimas Kristen berkisar dari tahun 2015 s.d tahun 2019

menargetkan 125 orang Guru PAK PNS dan Non PNS diantaranya yang sudah memiliki maupun yang belum memiliki Sertifikat dengan rincian sebagai berikut tahun 2015 target yang ingin di capai 10 orang, tahun 2016 dengan target 20 orang, tahun 2017 targetnya 25 orang tahun 2018 targetnya 30 orang dan di Tahun 2019 targetnya 35 orang. sehingga jumlah kuota Guru PAK PNS dan Non PNS mencapai dengan target kinerja yang sudah di rencanakan dalam renstra Tahun 2015 s/d 2019 adalah 125 orang.

- Adapun penyebab adanya peningkatan kinerja Guru PAK PNS dan Non PNS tahun 2016 adalah mengalami suatu peningkatan dan keberhasilan dalam hal Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Kristen.
- Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya, adalah meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, Guru Agama Kristen.
- Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pernyataan Kinerja. adalah Meningkatnya Akses Pendidikan Keagamaan sesuai aspirasi umat beragama.

GURU PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK

C. Peningkatan ketersediaan guru pendidikan agama Katolik yang bersertifikat

- ✓ Presentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat.
 - Target peningkatan kualitas dan pelayanan kepada guru pendidikan agama Katolik yang telah bersertifikat telah direalisasikan secara menyeluruh untuk semua guru agama Katolik dalam bentuk alokasi pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang dibayarkan setiap semester atau setiap 6 bulan sekali dalam satu tahun. Adapun bentuk kualitas yang dimiliki adalah semakin meningkatnya kompetensi guru agama Katolik dalam hal proses belajar mengajar di sekolah.
 - Perbandingan Realisasi kinerja untuk bantuan peningkatan kualitas kepada guru agama Katolik yang telah bersertifikat untuk tahun 2016 sebanyak 32 orang tidak sama dengan tahun 2015 sebanyak 41 orang. Hal ini disebabkan karena pagu alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan

kepada guru agama Katolik yang bersertifikat pada DIPA tidak sesuai dengan data guru agama Katolik yang telah bersertifikat untuk tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015.

- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis bimas Katolik berkisar dari tahun 2015 s.d tahun 2019 menargetkan semua guru agama Katolik baik PNS maupun Non PNS sudah memiliki sertifikat pendidik. Sehingga peningkatan ketersediaan guru agama katolik yang telah bersertifikat dapat direalisasikan di setiap sekolah.
- Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dari terealisasinya bantuan yang diberikan kepada guru agama Katolik yang telah bersertifikat adalah sebagai berikut: Dari segi keberhasilan pembayaran bantuan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dapat tersalurkan dengan baik bagi semua guru agama Katolik yang telah memiliki sertifikat pendidik tepat sasaran dan tepat guna bagi yang berhak menerima. Sedangkan dari segi kegagalan adalah alokasi anggaran dalam DIPA tidak sesuai dengan guru agama Katolik yang telah menerima sertifikat pendidik, hal ini berdampak tidak semua anggaran dapat direalisasikan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari guru agama Katolik yang telah bersertifikat tidak dapat diragukan lagi kompetensi atau kemampuannya karena telah memenuhi kriteria yang memadai khususnya dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan keagamaan Katolik yang diampunya.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - ✓ Bahwa semua guru agama Katolik yang telah bersertifikat telah mengikuti PLPG.
 - ✓ Bahwa dalam proses pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru agama Katolik yang telah memiliki sertifikat pendidik telah dilakukan dengan seleksi administrasi proses belajar mengajar di sekolah.

GURU PENDIDIKAN AGAMA HINDU

D. Peningkatan ketersediaan guru pendidikan agama Hindu yang bersertifikat

a. Guru penerima tunjangan fungsional

o Tunjangan fungsional guru

- Tunjangan fungsional guru agama Hindu non PNS . Jumlah 40 Orang dengan dana sebesar Rp. 144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah). Pelaksanaan pembayaran dapat dilaksanakan sesuai dengan target dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah), dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator inputs 100%, Output 100%, dan outcomes 100%.
- Pembayaran gaji dan tunjangan PNS selama 1 Tahun dengan dana sebesar Rp 1.032.707.000,- (Satu milyar tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah). Pembayaran gaji dan tunjangan PNS Hindu dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 994.307.602,- (Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus dua rupiah) dan adanya juga efisiensi dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator inputs 97%, Output 100%, dan outcomes 97%.

GURU PENDIDIKAN AGAMA BUDHA

E. Peningkatan ketersediaan guru pendidikan agama Budha yang bersertifikat

- ✓ Presentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat.
 - Target peningkatan kualitas dan pelayanan kepada guru pendidikan agama Buddha yang telah bersertifikat telah direalisasikan secara menyeluruh untuk semua guru agama Buddha dalam bentuk alokasi pembayaran Tunjangan Profesi

Guru (TPG) yang dibayarkan setiap semester atau setiap 6 bulan sekali dalam satu tahun. Adapun bentuk kualitas yang dimiliki adalah semakin meningkatnya kompetensi guru agama Buddha dalam hal proses belajar mengajar di sekolah.

- Perbandingan Realisasi kinerja untuk bantuan peningkatan kualitas kepada guru agama Buddha yang telah bersertifikat untuk tahun 2016 sebanyak 17 orang tidak sama dengan tahun 2015 sebanyak 16 orang. Hal ini terjadi peningkatan penambahan jumlah kinerja guru yang bersertifikat sehingga pagu alokasi anggaran mengalami peningkatan dan kualitas pelayanan kepada guru agama Buddha yang bersertifikat pun meningkat dibandingkan dengan tahun 2015. dari perbandingan tersebut dengan adanya penambahan guru sebanyak 1 (satu) orang menyebabkan adanya peningkatan alokasi anggaran dari tahun sebelumnya. Dan pada Tahun 2016 alokasi anggaran meningkat disebabkan adanya Pembayaran Tunjangan Profesi Guru yang Terhutang sebanyak 3 orang. Dengan terbayarnya Tunjangan Profesi Guru yang terhutang maka penambahan kinerja guru Agama Buddha meningkat dan target yang diharapkan dapat tercapai.
- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis bimas Buddha berkisar dari tahun 2015 s.d tahun 2019 menargetkan semua guru agama Buddha baik PNS maupun Non PNS sudah memiliki sertifikat pendidik. Sehingga peningkatan ketersediaan guru agama Buddha yang telah bersertifikat dapat direalisasikan di setiap sekolah.
- Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dari terealisasinya bantuan yang diberikan kepada guru agama Buddha yang telah bersertifikat adalah sebagai berikut: Dari segi keberhasilan pembayaran bantuan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dapat tersalurkan dengan baik bagi semua guru agama Buddha yang telah memiliki sertifikat pendidik tepat sasaran dan tepat guna bagi yang berhak menerima. Sedangkan dari segi kegagalan adalah alokasi anggaran dalam DIPA tidak sesuai dengan guru agama Buddha yang telah menerima

sertifikat pendidik, hal ini berdampak tidak semua anggaran dapat direalisasikan.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari guru agama Buddha yang telah bersertifikat tidak dapat diragukan lagi kompetensi atau kemampuannya karena telah memenuhi kriteria yang memadai khususnya dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan keagamaan Buddha yang
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - ❖ Bahwa semua guru agama Buddha yang telah bersertifikat telah mengikuti PLPG.
 - ❖ Bahwa dalam proses pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru agama Buddha yang telah memiliki sertifikat pendidik telah dilakukan dengan seleksi administrasi proses belajar mengajar di sekolah.

5. MENINGKATNYA AKSES PENDIDIKAN KEAGAMAAN SESUAI ASPIRASI UMAT BERAGAMA

PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

Indikator peningkatan akses pendidikan keagamaan islam diandai dengan meningkatnya jumlah peserta didik pada lembaga keagamaan islam yang ada di Nusa Tenggara Barat. Upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2016, untuk mewujudkan sasaran strategis ini yaitu dengan menyediakan anggaran berupa bantuan rehabilitasi dan pembangunan, serta dengan menyediakan anggaran pelatihan serta workshop bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang ada pada lembaga keagamaan islam untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada pada lembaga keagamaan islam di Nusa Tenggara Barat.

Pada Tahun 2016, dengan adanya penghematan yang dilakukan oleh pemerintah, maka otomatis memangkas anggaran-anggaran yang

bersifat bantuan pada lembaga pendidikan swasta, yang menyebabkan tidak tersalurkannya bantuan pemerintah berupa peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada pada anggaran bidang pendidikan agama dan keagamaan islam. Hal ini berdampak pada realisasi anggaran dan pencapaian target pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 jumlah target peserta didik pada pendidikan keagamaan islam berjumlah 224.843 orang. Sedangkan realisasi jumlah peserta didik pada pondok pesantren sebanyak 228.281 orang atau 101,53 %. Sedangkan pada tahun 2017, target jumlah peserta didik pada lembaga pendidikan keagamaan islam sejumlah 247.327 orang atau bertambah sebanyak 22.484 orang atau meningkat sebanyak 10%. Dari hasil capaian tahun 2016 sebanyak 228.281 orang, maka tentunya diharapkan pada tahun 2017 realisasi peningkatan jumlah peserta didik pada lembaga pendidikan keagamaan islam akan melebihi jumlah target yang telah ditetapkan.

PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

Target peningkatan kualitas dan pelayanan kepada akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama pada sekolah negeri dan sekolah swasta pada tahun 2016 berjumlah 5.000 orang. Untuk pelayanan proses belajar mengajar pendidikan agama Kristen di sekolah Bimas Kristen telah memfasilitasi untuk menyediakan guru agama Kristen baik PNS maupun Non PNS dengan maksud supaya semua siswa/siswi yang beragama Kristen mendapatkan pelajaran agama di sekolah masing-masing sesuai dengan aspirasi umat beragama.

Perbandingan Realisasi kinerja untuk akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama. Bimas Kristen juga berpartisipasi

mengadaan pembinaan kepada siswa/siswi yang beragama Kristen berupa kegiatan rekoleksi, ret-ret dan pembinaan suara hati. Pembinaan keagamaan bagi peserta didik ini sangat perlu dilakukan karena nilai-nilai moral dan budi pekerti yang mereka dapatkan di sekolah formal akan dapat membantu peserta didik dalam pertumbuhan kedewasaan moral dan perilaku sehari-hari, sehingga harapannya mereka tumbuh sebagai generasi penerus bangsa yang berbudi luhur dan berahlak mulia.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis bimas Kristen berkisar dari tahun 2015 s.d tahun 2019 menargetkan semua peserta didik pada sekolah negeri dan swasta memiliki peningkatan baik dari jumlah peserta didik maupun kualitas kompetensi dan pedagogik yang akan dimiliki oleh semua peserta didik yang beragama Kristen.

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dari usaha peningkatan pendidikan keagamaan yang sesuai dengan aspirasi umat beragama yaitu dari analisis keberhasilannya semua siswa/siswi yang beragama Kristen yang tersebar dari semua sekolah negeri dan swasta mendapatkan pelayanan pelajaran agama Kristen baik yang belajar di sekolah maupun di Gereja. Sedangkan dari analisis kegagalan bahwa Bimas Kristen tidak memperoleh data tentang peserta didik yang akurat, khususnya data siswa/siswi beragama Kristen yang berada di sekolah-sekolah negeri maupun swasta di luar Yayasan Insan Mandiri Cabang Lombok.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya bagi peserta didik pada lembaga keagamaan Kristen cukup diandalkan, hal ini dipengaruhi

juga dengan kualitas dari tenaga pendidik yang berkompeten dalam bidang ilmunya masing-masing.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Jumlah guru agama Kristen sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah siswa/siswi yang dilayani, hal ini mengakibatkan bahwa satu orang guru akan mengajar di beberapa sekolah.
- Masih banyak guru tidak tetap/guru honorer yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen, hal ini karena jumlah guru PNS sangat sedikit.

PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK

Target peningkatan kualitas dan pelayanan kepada akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama pada sekolah negeri dan sekolah swasta pada tahun 2016 berjumlah 1.200 orang. Untuk pelayanan proses belajar mengajar pendidikan agama Katolik di sekolah Bimas Katolik telah memfasilitasi untuk menyediakan guru agama Katolik baik PNS maupun Non PNS dengan maksud supaya semua siswa/siswi yang beragama Katolik mendapatkan pelajaran agama di sekolah masing-masing sesuai dengan aspirasi umat beragama.

Perbandingan Realisasi kinerja untuk akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama. Bimas Katolik juga berpartisipasi mengadakan pembinaan kepada siswa/siswi yang beragama Katolik berupa kegiatan rekoleksi, ret-ret dan pembinaan suara hati. Pembinaan keagamaan bagi peserta didik ini sangat perlu dilakukan karena nilai-nilai moral dan budi pekerti yang mereka dapatkan di sekolah formal akan dapat membantu peserta didik dalam pertumbuhan kedewasaan moral dan perilaku sehari-hari, sehingga harapannya mereka tumbuh sebagai generasi penerus bangsa yang berbudi luhur dan berahlak mulia. Amin.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis bimas Katolik berkisar dari tahun 2015 s.d tahun 2019 menargetkan semua peserta didik pada sekolah negeri dan swasta memiliki peningkatan baik dari jumlah peserta didik maupun kualitas kompetensi dan pedagogik yang akan dimiliki oleh semua peserta didik yang beragama Katolik.

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dari usaha peningkatan pendidikan keagamaan yang sesuai dengan aspirasi umat beragama yaitu dari analisis keberhasilannya semua siswa/siswi yang beragama Katolik yang tersebar dari semua sekolah negeri dan swasta mendapatkan pelayanan pelajaran agama Katolik baik yang belajar di sekolah maupun di Gereja. Sedangkan dari analisis kegagalan bahwa Bimas Katolik tidak memperoleh data tentang peserta didik yang akurat, khususnya data siswa/siswi beragama Katolik yang berada di sekolah-sekolah negeri maupun swasta di luar Yayasan Insan Mandiri Cabang Lombok.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya bagi peserta didik pada lembaga keagamaan Katolik cukup diandalkan, hal ini dipengaruhi juga dengan kualitas dari tenaga pendidik yang berkompeten dalam bidang ilmunya masing-masing.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Jumlah guru agama Katolik sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah siswa/siswi yang dilayani, hal ini mengakibatkan bahwa satu orang guru akan mengajar di beberapa sekolah.
- Masih banyak guru tidak tetap/guru honorer yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik, hal ini karena jumlah guru PNS

sangat sedikit.

JUMLAH PESERTA DIDIK PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDHA

Target peningkatan kualitas dan pelayanan kepada akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama pada sekolah negeri dan sekolah swasta pada tahun 2016 berjumlah 1793 orang. Untuk pelayanan proses belajar mengajar pendidikan agama Buddha di sekolah Umum maupun swasta Bimas Buddha telah memfasilitasi untuk menyediakan guru agama Buddha baik PNS maupun Non PNS dengan maksud supaya semua siswa/siswi yang beragama Buddha mendapatkan pelajaran agama di sekolah masing-masing sesuai dengan aspirasi umat beragama.

Perbandingan Realisasi kinerja untuk akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama. Bimas Buddha juga berpartisipasi mengadakan pembinaan kepada siswa/siswi yang beragama Buddha berupa kegiatan pekan penghayatan dhamma, pembinaan tentang Narkoba, pembinaan tentang pentingnya kesehatan menurut buddhis dan kegiatan sippa dhamma samajja. Pembinaan keagamaan bagi peserta didik ini sangat perlu dilakukan karena nilai-nilai moral dan budi pekerti yang mereka dapatkan di sekolah formal akan dapat membantu peserta didik dalam pertumbuhan kedewasaan moral dan perilaku sehari-hari, sehingga harapannya mereka tumbuh sebagai generasi penerus bangsa yang berbudi luhur, berahlak mulia serta dapat mempraktekan sila dalam kehidupan sehari-hari.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis bimas Buddha berkisar dari tahun 2015 s.d tahun 2019 menargetkan semua peserta didik pada sekolah negeri dan swasta memiliki

peningkatan baik dari jumlah peserta didik maupun kualitas kompetensi dan pedagogik yang akan dimiliki oleh semua peserta didik yang beragama Buddha

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dari usaha peningkatan pendidikan keagamaan yang sesuai dengan aspirasi umat beragama yaitu dari analisis keberhasilannya semua siswa/siswi yang beragama Buddha yang tersebar dari semua sekolah negeri dan swasta mendapatkan pelayanan pelajaran agama Buddha baik yang belajar di sekolah maupun di SMB dan Dhammasekha. Sedangkan dari analisis kegagalan bahwa Bimas Buddha tidak memperoleh data tentang peserta didik yang akurat, khususnya data siswa/siswi beragama Buddha yang berada di sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang tidak memiliki guru Agama Buddha. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya bagi peserta didik pada lembaga keagamaan Buddha cukup diandalkan, hal ini dipengaruhi juga dengan kualitas dari tenaga pendidik yang berkompeten dalam bidang ilmunya masing-masing.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- ❖ Jumlah guru agama Buddha PNS sangat sedikit dan terbatas dibandingkan dengan jumlah siswa/siswi yang diajarkan.
- ❖ Masih banyak guru tidak tetap/guru honorer yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama Buddha, hal ini karena jumlah guru PNS sangat sedikit/terbatas.
- ❖ Pemberian honor untuk guru tidak tetap/guru honorer belum memenuhi standar kesejahteraan guru.

6. TERSELENGGARANYA TATAKELOLA PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

PRESENTASE TEMUAN BPK, BPKP, DAN ITJEN YANG DITINDAK LANJUTI

a. Tindak lanjut Temuan Inspektorat Jenderal:

Saldo Awal Pemutakhiran		Tindak Lanjut		Saldo Akhir Pemutakhiran	
<i>Kejadian</i>	<i>Rp.</i>	<i>Kejadian</i>	<i>Rp.</i>	<i>Kejadian</i>	<i>Rp.</i>
253	1.038.044.731,-	40	3.850.150,-	213	1.034.194.581,-

b. Tindak lanjut Temuan BPK-RI

Saldo Awal Pemutakhiran	Tindak Lanjut	Saldo Akhir Pemutakhiran
<i>Rp.</i>	<i>Rp.</i>	<i>Rp.</i>
108.518,-	108.518,-	0,-

7. MENINGKATNYA HARMONI SOSIAL DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan.

Capaian kinerja meliputi satu indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan. dilaksanakan dengan 1 kegiatan **Workshop Penanganan Konflik Tingkat provinsi dan Kabupaten Kota**. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa dikalangan masyarakat.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan:

- Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada.
- Kurangnya Koordinasi dengan Instansi terkait.
- Terbatasnya Sumber daya manusia
- Toleransi antar umat beragama

2. Terwujudnya Komunikasi Antara Tokoh Umat Beragama

Capaian kinerja meliputi satu indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan. Dilaksanakan dengan 1 kegiatan yaitu **Workshop Penguatan FKUB Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda**. Peningkatan pertemuan antar dan intern tokoh agama dan tokoh masyarakat dan tokoh tokoh lainnya.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan:

- Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada,
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
- Kualitas dan Kwantitas sumber daya manusia yang belum memadai.
- Kurangnya koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait
- Adanya pertemuan antar tokoh agama, Tokoh masyarakat dan pemuda lintas agama
- Pemanfaatan SEKBER

3. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengamanan dan kenyamanan lingkungan

Capaian kinerja meliputi satu indicator kinerja dengan capaian kinerja keseluruhan yang dilaksanakan dalam satu kegiatan yaitu **Workshop Peningkatan Wawasan Multi Cultural Dan Dialog Lintas Agama Tingkat Provinsi dan Kab./Kota**

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan:

- Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada,
- Kualitas dan Kwantitas sumber daya manusia yang belum memadai.
- Kurangnya koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait
- Terciptanya suasana kondusif dalam lingkungan
- Adanya pertemuan intensif antar Toga dan Toma

4. Terwujudnya Persepsi Dalam Pengendalian Lingkungan

Capaian kinerja meliputi satu indicator kinerja dengan capaian kinerja keseluruhan yang dilaksanakan dalam satu kegiatan yaitu **Workshop Pencegahan Konflik Tingkat Provinsi Dan Kabupaten Kota**

Analisi penyebab keberhasilan / kegagalan :

- Terbatasnya sarana dan prasarana
- Kualitas dan Kwantitas sumber daya manusia yang belum memadai
- Kurangnya toleransi umat beragama
- Berkurangnya tindak kriminalitas
- Terbentuknya kerukunan antar dan intern umat beragama

5. Pengetahuan Masyarakat Akan Informasi Yang Diberitakan Di Media Cetak Maupun Elektronik

Capaian kinerja meliputi satu indicator kinerja dengan capaian kinerja keseluruhan yang dilaksanakan dalam satu kegiatan yaitu **Workshop Peningkatan Wawasan Multicultural Dan Jurnlisme Damai**

Analisi penyebab keberhasilan / kegagalan :

- Kurangnya Sarana dan Prasarana
- Peningkatan informasi Sumber Daya Manusia tentang kerukunan
- Terbentuknya kelompok kelompok / actor actor kerukunan

8. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA.

BIDANG BIMAS ISLAM

Pelaksanaan program Islam pada tahun anggaran 2016 telah selesai dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan tuntasnya pencapaian pada masing-masing program. Salah satu diantaranya adalah peningkatan kualitas pelayanan kehidupan bergama.

- ❖ Jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan
 - Target peningkatan kualitas dan pelayanan kepada kehidupan bergama terdiri dari satu indikator yaitu: Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya. Adapun jumlah Kantor Urusan Agama yang dibangun untuk memenuhi standar layanan adalah sejumlah 13 Unit.
 - Dari 13 KUA yang dibangun tahun 2016 jika dibandingkan dengan jumlah KUA yang harus ditingkatkan kualitas layanannya makan sampai dengan tahun 2019 diperkirakan tidak akan terbangun seluruhnya karena berkaitan anggaran minim untuk pembangunan gedung. Untuk target jangka menengah ditergetkan 16 KUA namun yang terealisasi dalam DIPA hanya 2 KUA.
 - Peningkatan kualitas layanan keagamaan dalam hal ini jumlah gedung KUA yang dibangun berhasil terlaksana sesuai dengan target dengan adanya koordinasi seluruh pihak. Untuk pelaksanaan pada masa yang akan datang agar bentuk bangunan

disamakan.

- Dalam hal penggunaan sumber daya agar pelaksanaan lelang dilakukan lebih awal agar proyek bias selesai lebih cepat. Dan agar optimalisasi bangunan bias lebih cepat dilaksanakan.
- Untuk menunjang keberhasilan program pembangunan gedung KUA semua satker agar menyiapkan semua dokumen bagi suksesnya pelaksanaan baik perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan program.

❖ Jumlah rumah ibadah Agama Islam yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya.

- Target peningkatan kualitas dan pelayanan kepada kehidupan beragama terdiri dari satu indikator yaitu: Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya. Adapun jumlah rumah ibadah yang dibantu pada tahun 2016 adalah sebanyak 5 rumah ibadah, hal ini karena sesuai dengan apa yang ditargetkan sebanyak 1 rumah ibadah atau setara dengan dengan realisasi sebesar 100%.
- Perbandingan realisasi kinerja untuk rumah ibadah yang dibantu tahun 2015 sejumlah 111 lokasi sedangkan tahun 2016 hanya 5 lokasi. Jadi terdapat penurunan yang signifikan dalam hal peningkatan kualitas layanan rumah ibadah.
- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini tidak sesuai dengan target yang hanya terbantu sejumlah 5 rumah ibadah. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah sejumlah 500 rumah ibadah dengan capaian tahun ini maka sulit dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.
- Penurunan jumlah alokasi bantuan rumah ibadah adalah karena berkurangnya anggaran. Sedangkan dari 5 lokasi sudah terbantu secara keseluruhan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan rumah ibadah agama Islam. Diharapkan anggaran yang sesuai untuk bantuan peningkatan kualitas layanan rumah ibadah pada tahun yang akan datang.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya bagi peningkatan kualitas rumah ibadah adalah sudah terlaksananya dengan baik program rehab rumah ibadah sesuai dengan rab dan

terlaksananya pelaporan pertanggung jawaban oleh penerima bantuan.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - ✓ Alokasi anggaran untuk rumah ibadah dapat direalisasikan dengan tepat jumlah, tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan target yang telah direncanakan.
 - ✓ Anggaran yang dialokasikan tidak sesuai dengan jumlah rumah ibadah yang ada.

BIMAS KRISTEN

- ❖ Jumlah rumah ibadah Agama Kristen yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya.
 - Target peningkatan kualitas dan pelayanan kepada kehidupan beragama terdiri dari satu indikator yaitu: Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya. Adapun jumlah rumah ibadah yang dibantu pada tahun 2016 adalah sebanyak 6 rumah ibadah, hal ini karena sesuai dengan rencana yang ditargetkan dalam DIPA Bimas Kristen tahun 2016 sebanyak 6 rumah ibadah atau setara dengan realisasi sebesar 100%.
 - Perbandingan Realisasi kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan bergama. Realita masyarakat Kristen sangat mengharapkan bantuan yang lebih memadai untuk memfasilitasi keamanan dan kenyamanan rumah ibadah saat umat Kristen menjalankan ibadah khususnya dalam pembangunan atau renovasi gereja. Namun sehubungan dengan keterbatasannya anggaran, maka alokasi bantuan untuk rumah ibadah pada tahun 2016 hanya 6 rumah ibadah.
 - Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis bimas Kristen berkisar dari tahun 2015 s.d tahun 2019 menargetkan semua rumah ibadah Kristen yang difasilitasi harus semua mendapat peningkatan pelayanan untuk membangun rumah ibadah yang bersih dan nyaman untuk

digunakan pada saat menjalankan ibadah.

- ❖ Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dari Jumlah rumah ibadah Agama Kristen yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya yaitu: rumah ibadah Kristen lebih memadai, lebih nyaman dan lebih aman bagi umat Kristen saat menjalankan ibadah. Sedangkan kegagalan adalah masih sedikitnya alokasi anggaran untuk pembangunan atau renovasi rumah ibadah.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya bagi rumah ibadah yang difasilitasi sangat akurat hal ini dibuktikan dengan partisipasi para Tokoh Agama Kristen dan umat Kristen dalam memanfaatkan rumah ibadah yang telah dibantu. Selain itu juga mengenai laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dibantu dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - Alokasi anggaran untuk rumah ibadah dapat direalisasikan dengan tepat jumlah, tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan target yang telah direncanakan.
 - Anggaran yang dialokasikan tidak sesuai dengan jumlah rumah ibadah yang ada.

BIMAS KATOLIK

- ❖ Jumlah rumah ibadah Agama Katolik yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya.
 - Target peningkatan kualitas dan pelayanan kepada kehidupan beragama terdiri dari satu indikator yaitu: Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya. Adapun jumlah rumah ibadah yang dibantu pada tahun 2016 adalah sebanyak 1 rumah ibadah, hal ini karena sesuai dengan apa yang ditargetkan sebanyak 1 rumah ibadah atau setara dengan dengan realisasi sebesar 100%.
 - Perbandingan Realisasi kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan bergama. Realita masyarakat Katolik sangat mengharapkan bantuan yang lebih memadai untuk memfasilitasi keamanan dan kenyamanan rumah

ibadah saat umat Katolik menjalankan ibadah khususnya dalam pembangunan atau renovasi gereja. Namun sehubungan dengan keterbatasannya anggaran, maka alokasi bantuan untuk rumah ibadah pada tahun 2016 hanya 1 rumah ibadah.

- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis bimas Katolik berkisar dari tahun 2015 s.d tahun 2019 menargetkan semua rumah ibadah Katolik yang difasilitasi harus semua mendapat peningkatan pelayanan untuk membangun rumah ibadah yang bersih dan nyaman untuk digunakan pada saat menjalankan ibadah.
- ❖ Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dari Jumlah rumah ibadah Agama Katolik yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya yaitu: rumah ibadah Katolik lebih memadai, lebih nyaman dan lebih aman bagi umat Katolik saat menjalankan ibadah. Sedangkan kegagalan adalah masih sedikitnya alokasi anggaran untuk pembangunan atau renovasi rumah ibadah.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya bagi rumah ibadah yang difasilitasi sangat akurat hal ini dibuktikan dengan partisipasi para imam dan umat Katolik dalam memanfaatkan rumah ibadah yang telah dibantu. Selain itu juga mengenai laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dibantu dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - Alokasi anggaran untuk rumah ibadah dapat direalisasikan dengan tepat jumlah, tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan target yang telah direncanakan.
 - Anggaran yang dialokasikan tidak sesuai dengan jumlah rumah ibadah yang ada.

BIDANG BIMAS HINDU

Rumah Ibadah yang berkualitas

- Bantuan Tempat Ibadah Agama Hindu
Bantuan Pembangunan/Rehab Pura untuk 5 Lokasi dengan dana sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perlokasi sehingga total anggarannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bantuan tersebut telah disalurkan kepada lembaga penerima bantuan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perlokasi. Pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator inputs 100%, output 100%, dan outcomes 100%.

BIMAS BUDHA

- Jumlah rumah ibadah Agama Buddha yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya.
 - Target peningkatan kualitas dan pelayanan kepada kehidupan beragama terdiri dari satu indikator yaitu: Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya. Adapun jumlah rumah ibadah yang dibantu pada tahun 2016 adalah sebanyak 3 rumah ibadah terdiri dari 2 lokasi untuk rehab vihara dan 1 lokasi untuk rehab Maha Stupa dan bantuan yang diterima masing-masing melalui rekening sebesar Rp. 50.000.000,-, hal ini karena sesuai dengan apa yang ditargetkan sebanyak 3 rumah ibadah atau setara dengan dengan realisasi sebesar 100%.
 - Perbandingan Realisasi kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan bergama. Realita masyarakat Buddha sangat mengharapkan bantuan yang lebih memadai untuk memfasilitasi keamanan dan kenyamanan rumah ibadah saat umat Buddha menjalankan ibadah khususnya dalam pembangunan atau rehabilitasi Vihara/Maha Stupa. Namun sehubungan dengan keterbatasannya anggaran, maka alokasi bantuan untuk rumah ibadah pada tahun 2016 hanya dialokasikan 3 rumah ibadah. Sedangkan

Tahun 2015 bantuan diberikan sebanyak 10 lokasi Vihara/Maha Stupa dengan dana sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah). Terdiri dari 8 lokasi untuk vihara dan 2 lokasi untuk Maha Stupa. Dilihat dari perbandingan pada Tahun 2016 bantuan mengalami penurunan anggaran sebesar Rp.350.000.000,-, target dan realisasi pencapaian kinerja yang diukur sama tingkat capaian output dan outcomes yaitu sama-sama 100 %. Akan tetapi hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan rumah ibadah yang belum memadai.

- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis bimas Buddha berkisar dari tahun 2015 s.d tahun 2019 menargetkan 7 rumah ibadah yang difasilitasi sehingga peningkatan kualitas pelayanan untuk membangun rumah ibadah yang bersih dan nyaman yang digunakan untuk menjalankan ibadah akan tercapai.
- ❖ Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dari Jumlah rumah ibadah Agama Buddha yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya yaitu: rumah ibadah Buddha lebih memadai, lebih nyaman dan lebih aman bagi umat Buddha saat menjalankan ibadah. Sedangkan kegagalan adalah masih sedikitnya alokasi anggaran untuk pembangunan atau renovasi rumah ibadah.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya bagi rumah ibadah yang difasilitasi sangat akurat hal ini dibuktikan dengan partisipasi para pengurus dan umat Buddha dalam memanfaatkan rumah ibadah yang telah dibantu. Selain itu juga mengenai laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dibantu dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - ❖ Alokasi anggaran untuk rumah ibadah dapat direalisasikan dengan tepat jumlah, tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan target yang telah

direncanakan.

- ❖ Anggaran yang dialokasikan tidak sesuai dengan jumlah rumah ibadah yang ada.

JUMLAH KITAB SUCI YANG DIDISTRIBUSIKAN

- ❖ Jumlah kitab suci agama Islam yang didistribusikan.
 - Pada tahun 2016 tidak terdapat kitab suci yang didistribusikan dari target 8640 kitab suci.
 - Perbandingan realisasi kinerja tahun ini lebih rendah dari tahun 2016. Untuk tahun 2017 tidak terdapat distribusi kitab suci. Jadi terdapat penurunan kualitas distribusi kitab suci.
 - Terdapat penurunan realisasi kinerja untuk tahun ini karena tidak terdapat kitab suci yang didistribusikan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sejumlah 50.000 kitab suci.
 - Diperlukan konsistensi pengadaan kitab suci agar daerah dapat menetapkan dan melaksanakan target sesuai rencana.

9. MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI KEAGAMAAN

Jumlah dana zakat yang terhimpun :

- Dari target 35 miliar untuk tahun ini yang tercapai sejumlah 41 miliar rupiah. Terdapat pencapaian bahan melewati target yang sudah ditetapkan.
- Realiasi kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 pengumpulan zakat sejumlah 36 miliar rupiah dari target 36 miliar. Untuk tahun 2017 terkumpul terkumpul 41 miliar dari target 35 miliar.
- Terdapat peningkatan kualitas kinerja dari tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 dari sisi pengumpulan. Untuk target jangka menengah ditargetkan pengumpulan sejumlah 50 miliar rupiah.
- Keberhasilan penghimpunan zakat oleh BAZNAS baik provinsi maupun kabupaten dan kota adalah berkat kerjasama yang baik oleh pengelola zakat dengan pemerintah dan pihak pihak yang berkepentingan dengan peningkatan pengelolaan zakat. Perlu

peningkatan kualitas dan kuantitas pengelola zakat.

- Untuk efisiensi penggunaan sumber daya pengelolaan zakat terdapat perbedaan jumlah maupun cara rekrutmen pengurus. Namun dari sisi efisiensi masih kurangnya jumlah maupun sasaran dari objek zakat.
- Keberhasilan pencapaian kinerja terkait penghimpunan dana zakat adalah adanya kesinambungan program pemerintah dengan pengelola zakat dalam hal ini amil zakat baik BAZNAS maupun LAZ. Kekurangannya adalah perlunya koordinasi terpadu terkait pengelolaan data serta pendistribusian zakat agar mencapai target meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam.

❖ **Persentase tanah wakaf bersertifikat**

- Dari target 100 sertifikat namun tidak dapat tercapai karena tidak terdapatnya anggaran DIPA untuk melaksanakan program sertifikasi.
- Realisasi kinerja untuk sertifikasi menurun. Sejak tahun 2016 tidak ada lagi anggaran untuk sertifikasi.
- Jika dibandingkan antara realisasi tahun ini dengan dengan target jangka menengah masih jauh dari target. Tanah wakaf yang belum diterbitkan sertifikat sejumlah 5768 bidang. Dengan target jangka menengah terbitnya 500 sertifikat tanah wakaf.
- Penurunan kinerja tahun 2017 karena tidak terdapatnya anggaran dalam DIPA.
- Masih kurangnya kualitas sumber daya dalam mendukung terbitnya sertifikat tanah wakaf dari penyiapan berkas hingga terbitnya sertifikat.
- Untuk keberhasilan terbitnya sertifikat tanah wakaf dibutuhkan kerjasama dengan para pihak terutama BPN agar waktu penerbitan sesuai dengan target jadwal yang ditentukan. Kegagalan pencapaian kinerja disebabkan kurangnya kesiapan SDM untuk menyiapkan berkas sertifikat.

10. MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH YANG TRANSPARAN EFISIEN, DAN AKUNTABEL

Laporan Akuntabilitas Kinerja Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tahun 2016, menyajikan keberhasilan/capaian strategis Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dan beberapa hal yang perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kerja Utama (IKU) maupun analisis kerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, seluruh Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah disusun berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja (Penetapan Kinerja) dan Renstra (Rencana Strategis) Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2016-2019 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah, masih menjadi rencana dan sasaran strategis seluruh program, kegiatan maupun kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilakukan dengan berbagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah antara lain dilakukan melalui revitalisasi asrama haji, pengembangan sistem pendaftaran haji, pengembangan pelayanan haji, optimalisasi dana haji dan reformasi keuangan haji, rasionalisasi BPIH, peningkatan kualitas laporan keuangan haji, dan peningkatan akuntabilitas Dana Abadi Umat (DAU).

Selama tahun 2010 s.d. 2013 pengelolaan asrama haji selalu menjadi sorotan masyarakat khususnya terkait dengan pengelolaan dana asrama haji. Pada tahun 2014, Kementerian Agama telah berupaya untuk memperbaiki pengelolaan asrama haji yaitu dengan menjadikan asrama haji sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) sudah menyetujui 9 (sembilan) asrama haji yang akan ditetapkan sebagai UPT, dan telah diperkuat dengan terbitnya Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri PAN & RB. Sembilan asrama

haji yang akan ditetapkan sebagai UPT yakni asrama haji Aceh, Medan, Padang, Jakarta (Pondok Gede), Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Nusa Tenggara Barat. Selain penetapan UPT tersebut, saat ini Kementerian Agama telah melaksanakan pembangunan dan revitalisasi asrama haji. Pada tahun 2013 dilakukan revitalisasi pada 4 asrama haji embarkasi dan sebuah asrama transit, selanjutnya pada tahun 2014 dilakukan revitalisasi terhadap 4 asrama haji embarkasi.

Kebijakan dalam proses pendaftaran haji yang telah dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah dengan menerapkan prinsip *first come first served* sesuai perolehan nomor porsi berdasarkan alokasi kuota secara nasional maupun provinsi. Pengembangan pendaftaran haji sistem *online* juga telah dilakukan secara bertahap yang diawali dengan memanfaatkan *main system* milik Garuda Indonesia sebagai *host* Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang tersambung dengan Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH, yang dimulai sejak tahun 1996. Siskohat yang dibangun dan terhubung sampai tingkat kabupaten/kota telah memberikan kemudahan dan kecepatan layanan, pengendalian pendaftaran dan penyetoran lunas BPIH, pengendalian kuota haji nasional secara tersistem, dan upaya memberikan kepastian pergi haji pada tahun berjalan, serta adil secara berurutan untuk memperoleh nomor porsi haji. Pendaftaran haji melalui Siskohat dilakukan sepanjang tahun yang dapat dimonitor dan dikendalikan setiap saat secara *real time*. Siskohat pada awalnya didesain berbasis *Green Screen* (Aplikasi *Power Term*) dimana pengguna dan lisensi yang terbatas yaitu pengguna harus meng-install aplikasi khusus. Namun semakin berkembangnya teknologi, Siskohat yang dikembangkan sudah berbasis *website* yang dapat diakses menggunakan browser internet seperti *Google Chrome*, *Internet Explorer*, dan *Mozilla Firefox*.

Pengembangan Pelayanan Haji dalam rangka peningkatan pelayanan kepada jemaah haji, telah ditempuh langkah-langkah perbaikan berupa pengembangan **sistem manajemen mutu** (SMM), penyusunan dan penerbitan ISO:9001 dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010 yang telah diperoleh sejak Tahun 2010. Penerapan ISO 9001 pada unit pelayanan haji di pusat, sebagian daerah dan Arab Saudi. Untuk menjamin terlaksananya sistem ISO 9001 dilakukan internal audit dan eksternal audit (*surveillance*), untuk memungkinkan melakukan

penyempurnaan SMM dan pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) apabila diperlukan. Salah satu tuntutan penerapan Sistem ISO 9001 adalah keharusan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan (jemaah haji). Berdasarkan hasil survey kepuasan jemaah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama 5 tahun terakhir ini tingkat kepuasan jemaah dapat dipertahankan dalam kategori memuaskan. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan jemaah haji rata-rata tahun 2010 sebesar 81,45%, tahun 2011 sebesar 83,31 %, tahun 2012 sebesar 81,32%, Tahun 2013 sebesar 82,69%, dan tahun 2014 sebesar 81,52% dan terakhir pada tahun 2016 sebesar 85,52%.

Di samping itu, pada tahun 2013 Kementerian Agama juga mendapatkan penghargaan dalam **World Hajj and Umrah Convention (WHUC)** sebagai penyelenggara haji terbaik. Secara keseluruhan, ada lebih dari 5.000 organisasi yang mengajukan voting untuk menentukan negara manakah yang memiliki predikat sebagai penyelenggara haji terbaik. Untuk itu, WHUC memberikan medali emas kepada Indonesia yang merupakan penghargaan untuk kategori **best pilgrimm**, sekaligus penghargaan paling prestisius di WHUC. Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di tanah air yang telah berjalan meliputi bimbingan manasik haji, penyiapan dokumen haji, akomodasi pada asrama haji embarkasi, dan transportasi udara. Adapun penjelasannya sebagai berikut; (1) Bimbingan manasik haji dilaksanakan di KUA dan Kankemenag Kabupaten/Kota. Pengembangan metode bimbingan menggunakan metode ceramah, DVD manasik dan perjalanan ibadah haji, program aplikasi manasik haji; (2) Dengan diberlakukannya kebijakan *e-hajj* oleh Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, maka untuk mempercepat penyelesaian dokumen haji (visa) menggunakan alat *e-reader*; (3) Sebelum pemberangkatan, jemaah haji dikarantina di asrama haji embarkasi untuk meningkatkan kesiapan fisik dan mental; (4) Untuk kenyamanan dan keamanan pelayanan penerbangan bagi jemaah haji, maka dalam penetapan perusahaan penerbangan didasarkan pada hasil seleksi administratif dan teknis. Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi yang telah berjalan meliputi pemondokan/akomodasi, transportasi, dan catering.

Sistem sewa pemondokan Mekkah dilakukan dengan kontrak langsung kepada pemilik rumah/penyewa atau melalui Maktab Aqari,

sedangkan di Madinah melalui Majmua (*service group*). Sewa pemondokan di Madinah dengan melakukan sistem penyewaan akomodasi langsung kepada pemilik hotel yang memberikan kepastian penempatan kepada Jemaah haji di wilayah markaziyah dengan menggunakan sistem sewa musim atau sewa semi musim dan melakukan penyewaan lebih awal agar kapasitas yang ada di Markaziyah tidak disewa lebih dulu oleh misi haji negara lain. Transportasi antar kota perhajian (Jeddah, Madinah, Makkah, dan Armina), dilaksanakan oleh Naqabah (organda Arab Saudi). Khusus untuk transportasi di Armina menggunakan sistem *shuttle* (Taraddudi). Untuk jemaah haji yang menempati pemondokan dengan jarak lebih dari 2 km ke dan dari Masjidil Haram disiapkan transportasi sholawat. Layanan katering di Arab Saudi meliputi layanan katering di Makkah, Madinah, Arafah Mina, Hotel Transito, dan Bandara KAIA Jeddah pada saat kedatangan dan kepulangan jemaah haji. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan katering dilakukan dengan memperkuat pengawasan melalui penempatan petugas per maktab. Pengawasan katering meliputi aspek menu, rasa, pengolahan, higienitas, gizi dan sanitasi. Menerapkan system e-hajj sebagaimana yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Optimalisasi Dana Haji dan Reformasi Keuangan Haji dilakukan dengan mengoptimalkan setoran awal. Kebijakan ini dimulai Tahun 2004, yakni mulai menerapkan pendaftaran haji dengan menggunakan setoran awal. Optimalisasi setoran awal hanya berbentuk giro karena jumlah pendaftar masih sedikit, sehingga jumlah perolehan nilai manfaat masih sedikit dan digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan di Arab Saudi. Seiring dengan perkembangan jumlah pendaftar haji yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang juga berimplikasi terhadap meningkatnya akumulasi dana setoran haji maka telah diambil kebijakan optimalisasi dan reformasi pengelolaan dana haji. Untuk mengoptimalkan dana setoran awal BPIH yang semakin besar, penempatan dana telah diperluas dari hanya pada rekening giro juga di deposito, pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk, dan Penyertaan Saham pada Bank Muamalat Indonesia untuk mendapatkan nilai manfaat lebih besar. Hasil optimalisasi dana haji yang telah dihimpun sepanjang tahun 2010-2014 adalah sebesar Rp.11,29 triliun.

Selain itu untuk memperjelas sumber pemenuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama telah melakukan pemilahan komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu *Direct Cost* dan *Indirect Cost*. *Direct Cost* adalah Komponen BPIH yang dibebankan langsung kepada jemaah haji dan *Indirect Cost* adalah komponen BPIH yang dibebankan kepada nilai manfaat dari setoran awal BPIH. Sejak tahun 2007, dengan meningkatnya setoran awal dan nilai manfaat, atas dukungan dan persetujuan DPR RI, nilai manfaat telah digunakan untuk mengurangi beban jemaah haji (*Direct Cost*).

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Haji Secara umum, dimana tata kelola penyelenggaraan ibadah haji telah berjalan dengan baik, yaitu dengan dibuktikan melalui upaya Kementerian Agama dalam melakukan optimalisasi dana haji dan reformasi keuangan haji yaitu dengan terbebasnya Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji dari opini ***Disclaimer*** menjadi ***Wajar Dengan Pengecualian*** (WDP) pada tahun 2011, 2012, dan 2013 oleh BPK RI, dan predikat ***Wajar Tanpa Pengecualian*** (WTP) sejak tahun 2014, 2015 dan 2016. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk tetap mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji dan akan terus ditingkatkan menjadi lebih baik dan transparan, serta menunjukkan pula bahwa dana haji dikelola secara profesional dan akuntabel oleh Kementerian Agama. Tahun 2009 opini BPK RI *Disclaimer*, tahun 2010 *Disclaimer*, tahun 2011 Wajar Dengan Pengecualian, tahun 2012 Wajar Dengan Pengecualian, tahun 2013 Wajar Dengan Pengecualian.

Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan BPIH, Kementerian Agama telah melakukan beberapa langkah, yaitu rekrutmen tenaga akuntan, menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, dengan menggunakan referensi utama Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Sosialisasi, Dan Pelatihan Akuntansi Keuangan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Laporan Akuntabilitas Dana Abadi Umat (DAU) telah diaudit oleh BPK RI dan memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian. Pada audit tahun 2016 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan DAU, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang substansinya bahwa pengelolaan keuangan haji dikelola secara independen oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH memiliki posisi yang strategis karena merupakan badan independen penampung setoran awal BPIH yang bertanggungjawab ke Presiden melalui Menteri Agama. Untuk operasionalisasi BPKH, saat ini sedang dipersiapkan instrumen pendukung dan turunan UU 34 Tahun 2014 tersebut. Kementerian Agama melakukan pengelolaan terhadap Dana Abadi Umat (DAU) melalui Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU). DAU yang dikelola BP-DAU berasal dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan. BP-DAU memiliki fungsi menghimpun dan mengembangkan DAU sesuai dengan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; merencanakan, mengorganisasikan, mengelola, dan memanfaatkan DAU; dan melaporkan pengelolaan DAU kepada Presiden dan DPR.

Pengembangan Pelayanan di bidang Umrah juga dilakukan dengan memonitoring, menyeleksi dan menerbitkan kembali izin operasionalnya. Pada saat ini animo umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah ke tanah suci semakin meningkat ditandai dengan banyaknya jumlah jemaah umrah yang mengikuti ibadah umrah setiap tahun menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2012, tidak kurang dari 600 ribu jemaah umrah melaksanakan ibadah umrah yang dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Jumlah PPIU yang memiliki izin dari Kementerian Agama saat ini berjumlah 830 PPIU. Sedangkan jumlah PPIU yang mendapatkan izin resmi di Provinsi NTB tahun 2016 ini sebanyak 8 PPIU, dimana satu diantaranya adalah berkantor pusat di Mataram, sedangkan sisanya merupakan kantor cabang dari PPIU yang berkantor pusat di Jakarta. Tingginya permintaan terhadap pelaksanaan umrah belum sepenuhnya diikuti dengan kualitas pelayanan yang baik oleh penyelenggara, hal tersebut tercermin dari masih munculnya beberapa kasus penyimpangan/pelanggaran terhadap penyelenggaraan mulai dari terlantarnya jemaah umrah sampai dengan kematian. Untuk mengurangi hal negatif tersebut, dan guna meningkatkan pelayanan, pembinaan dan perlindungan bagi jemaah umrah sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 2008, Kementerian Agama telah menelorkan beberapa kebijakan strategis, yaitu ; (1) membentuk satu unit pelayanan umrah setingkat eselon II, yaitu Direktorat Pelayanan Umrah dan Haji KHusus; (2) berupaya untuk meningkatkan jaminan kualitas PPIU melalui proses akreditasi PPIU yang dilakukan secara bertahap. Kementerian Agama, dalam hal ini Ditjen PHU tidak menyelenggarakan ibadah umrah secara langsung, namun tugas dan fungsi Kementerian Agama adalah sebagai pemegang otoritas perizinan dan melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan dan kelancaran jemaah umrah. Para pejabat dan jajaran Kementerian Agama berperan dalam mengarahkan masyarakat agar berhati-hati sehingga tidak tertipu oleh biro perjalanan umrah yang tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Untuk itu akan dilakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan umrah dan akreditasi terhadap PPIU. Selain itu akan dilakukan penerapan pakta integritas bagi travel-travel penyelenggara haji dan umrah sebagai lanjutan dari 4 program aksi nyata untuk melakukan reformasi umrah secara bertahap dan komprehensif. Kementerian Agama juga telah melakukan proses hukum kepada perusahaan travel yang menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah tanpa izin.

Untuk merealisasikan berbagai program prioritas dan kebijakan strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana uraian di atas, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga melakukan berbagai langkah-langkah kebijakan di tahun 2016 yang

secara keseluruhan tingkat capaian kinerjanya mencapai 100 % dengan perhitungan bahwa dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar 92,52 %, dapat mencapai indikator dengan kategori “ Sangat Baik” dan besaran efisiensi anggaran sebesar 7,48 %, di maksudkan bahwa anggaran yang di efisiensi tersebut tidak di cairkan.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Rencana Strategik menetapkan visi "**Mewujudkan Jemaah Haji Mandiri dan Mabror**". Dari visi tersebut, telah ditetapkan menjadi 6 (enam) misi. Misi tersebut dipandang sebagai misi yang amat penting dan strategik karena mendasari kebijakan program dan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat dalam hal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
2. Memberikan bimbingan kepada Masyarakat tentang Manasik Haji;
3. Memberikan pembinaan dan bimbingan kepada Petugas Haji;
4. Pembinaan KBIH dengan membentuk forum komunikasi;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian dokumen haji melalui Siskohat;
6. Memberikan pelayanan terhadap perbekalan dan Akomodasi Haji.

Pencapaian sasaran kinerja Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016 tidak seluruhnya sesuai target capaian kinerja sesuai yang ditetapkan. Sasaran yang telah direalisasikan dapat digambarkan melalui besaran realisasi DIPA di tahun berjalan dibandingkan dengan pagu anggaran yang tersedia. Pada tahun 2016 Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 5.605.749.000,- Sedangkan Pagu Anggaran yang terdapat dalam DIPA pada program Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tahun 2016 sebesar Rp. 5.605.749.000,- .

Dengan demikian dapat diikhtisarkan bahwa capaian kinerja Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2016 secara keseluruhan mencapai 100 % dengan kategori Sangat Baik.

11. **MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TIDAK MAMPU TERHADAP PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA PENDIDIKAN DASAR-MENENGAH MELALUI MANFAAT KARTU INDONESIA PINTAR**
12. **MENINGKATNYA ANGKA PARTISIPASI PENDUDUK USIA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**
13. **MENURUNNYA JUMLAH SISWA YANG TIDAK MELANJUTKAN PENDIDIKAN**

LAPORAN CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2016

BIDANG PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH

3.2. Realisasi Anggaran

Ko de	Progra m	Kinerja	Target		Realisasi	
			Jumlah	%	Jumlah	%
21 21	Pengelol aan dan Pembina aan Pember dayaan Wakaf	1. Validasi Data Tanah Wakaf	101.525.000	100	101.525.000	100
		2. Monev Validasi Tanah Wakaf	52.500.00	100	5.523.400	10
		3. Rapat Koordinasi Dengan BPN	2.900.00	100	2.900.000	100
		4. Monev bantuan Wakaf	10.800.00	100	9.224.000	85
		5. Pencetakan Buku data Tanh Wakaf	4.500.00	100	4.500.000	100
		6. Orientasi Peningkatan Kompetensi PPAIW	99.758.00	100	97.984.00	98
21 22	Pengelol aan dan Pembina aan Pember dayaan Zakat	1. Pencetakan Brosur Zakat	13.000.00	100	13.000.00	100
2. Sosialisasi Pemasarakatan Regulasi Zakat		79.005.00	100	76.135.00	96	
3. Workshop Bimbingan Lembaga Amil zakat		81.020.00	100	78.010.00	96	
4. Orientasi Penyuluhan zakat Bagi takmir masjid		79.220.00	100	76.440.00	96	

		dan majelis taklim				
		5. Monitoring BAZNAS Kab/Kota	68.160.000	10	20.841.000	30
21 23	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	1. Pemilihan Penyuluhan Agama Islam	51.135.000	10	45.475.000	88
		2. Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Pada Anak	71.820.000	10	68.085.000	94
		3. Orientasi Seni Budaya Islam	70.820.000	10	66.340.000	93
		4. Sosialisasi Penanggulangan narkoba bagi Toga dan Toma	70.799.000	10	68.019.000	96
		5. Orientasi Penyiaran Agama Islam Melalui Media	72.470.000	10	69.932.000	96
		6. Rekrutmen PAH	52.586.000	10	47.286.000	89
		7. Pencetakan Khutbah dua hari Raya	12.500.000	10	12.500.000	100
		8. Bimbingan Dakwah Melalui Media	128.700.000	10	110.000.000	85
		9. Pengadaan Buku Iqro	60.000.000	10	60.000.000	100
		10. Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS	72.000.000	10	70.200.000	97
		11. Pelaksanaan Kegiatan MTQ	765.515.000	10	723.326.150	94
		12. Bimtek IT Bidang Musabaqah	75.093.000	10	73.390.000	97
		13. Bimtek MC Bidang Musabaqah	60.392.000	10	56.977.800	94
		14. Konsultasn IT	99.000.000	10	99.000.000	100
		15. Bantuan Majelis Taklim	250.000.000	10	250.000.000	100
		16. Pendampingan Festival Qasidah Nasional	33.730.000	10	12.411.400	36
21 24	Pengelolaan urusan Agama Islam	1. Orientasi Peningkatan Kompetensi Pengelola Perpustakaan Masjid	100.000.000	10	98.100.000	98

	dan Pembinaan Syariah	2. Orientasi Penyembelihan Hewan Halal	100.000.000	10	94.680.000	94
		3. Woekshop peningkatan Kewirausahaan keluarga pra sakinah	87.810.000	10	86.040.000	97
		4. Workshop SIMKAH	87.810.000	10	79.285.000	90
		5. Rakor Bimas Islam	274.530.000	10	274.520.000	100
		6. Monitoring Gedung SBSN	99.960.000	10	30.547.500	30
		7. Monitoring KUA	68.160.000	10	17.301.200	25
		8. Lomba KUA Teladan	73.290.000	10	57.968.614	79
		9. Lomba Pemilihan Keluarga sakinah	86.100.000	10	61.396.691	71
		10. Bantuan Rehab Masjid	150.000.000	10	150.000.000	100
		11. Bantuan rehab musholaa	50.000.000	10	50.000.000	100
		12. Workshop pembinaan masjid berbasis SIMAS	100.000.000	10	96.400.000	96
5	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	1. Gaji dan Tunjangan	2.661.906.000	10	2.121.837.166	79
		2. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	614.583.000	10	226.805.750	36
		Jumlah	7.606.017.000	10	6.389.782.729	84

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi Bimas Islamsesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

a. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2016

No	Uraian	TAHUN 2016			TAHUN 2017		
		Pagu (Rp) DIPA Kanwil	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian (%)	Pagu (Rp) DIPA Kanwil	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	2.733.906 .000	2.310.918 .324	84.53 %			%
2	Belanja Barang	5.804.296 .000	4.063.864 .405	83.67 %			%
3	Belanja Modal	15.000.00 0	15.000.00 0	100 %			%
	Total PAGU dalam DIPA	7.606.01 7.000	6.389.782 .729	68.03	5.518.34 5.000	2.364.490. 564	42.85

Dari sajian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran Bimas Islam pada tahun 2017 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya yaitu 2016. Penurunan anggaran ini sebesar Rp. 2.134738.000 atau 27 %. Namun dilihat dari aspek realisasi penyerapan anggaran maka penyerapan anggaran pada tahun 2017 samapai dengan triwulan III ini sudah mencapai 42 % dan 84,03% pada tahun 2016

3.3. Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan

Secara umum capaian kinerja Bimas Islam tahun 2016 sampai triwulan III ini lebih baik bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016.

a. Faktor pendukung keberhasilan antara lain :

1. Regulasi yang semakin jelas khususnya prosedural pencairan

2. Pengelola dan pihak terkait yang semakin memahami regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran.
 3. Kerjasama yang semakin baik antara pihak terkait : Pimpinan, team verifikasi, dan pengelola.
 4. Spirit dari lima nilai budaya kerja Kementerian Agama.
 5. Sarana dan prasarana yang semakin sempurna dalam menunjang pengelolaan anggaran.
 6. Kontinuitas pendampingan yang diadakan oleh Irjen Kementerian Agama dalam pengelolaan keuangan/Anggaran.
- b. Faktor penghambat, antara lain :
1. Penerima bantuan baik Lembaga Keagamaan maupun perorangan lamban dalam melengkapi persyaratan pencairan dana bantuan.
 2. Perubahan pada aturan pengelolaan anggaran.
 3. Kurangnya SDM pelaksana
 4. Terdapatnya tambahan anggaran dari pusat di tengah/akhir tahun
 5. Juknis kegiatan untuk tambahan anggaran tidak turun bersamaan dengan ditambahnya anggaran

HUKUM DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

LAPORAN CAPAIAN ANGGARAN 2016

N o	Sasaran strategis	Program kegiatan	Anggaran tahun 2016	Realisasi	Target
1	Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan	Workshop Penanganan Konflik Tingkat provinsi dan Kabupaten Kota	49.985.000	100%	100%
2	Terwujudnya Komunikasi Antara Tokoh Umat	Workshop Penguatan FKUB Tokoh Agama Tokoh	48.400.000	100%	100%

	Beragama	Masyarakat Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda			
3	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengamanan dan kenyamanan lingkungan	Workshop Peningkatan Wawasan Multi Cultural Dan Dialog Lintas Agama Tingkat Provinsi dan Kab./Kota	132.960.000	100%	100%
4	Terwujudnya Persepsi Dalam Pengendalian Lingkungan	Workshop Pencegahan Konflik Tingkat Provinsi Dan Kabupaten Kota	52.295.000	100%	100%
5	Pengetahuan Masyarakat Akan Informasi Yang Diberitakan Di Media Cetak Maupun Elektronik	Workshop Peningkatan Wawasan Multicultural Dan Jurnlisme Damai	48.400.000	100%	100%
6	Adanya	Penyaluran	450.000.00	100%	100%

	SEKBER FKUB Provinsi dan Kab. Kota	BOP SEKBER FKUB Prov. Dan Kab./Kota	0		
--	--	---	---	--	--

BIMAS KRISTEN

Secara lengkap pengukuran capaian Kinerja 2016 sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ;

Kode	Program	Kinerja	Target		Realisasi	
			Jumlah	%	Jumlah	%
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	7. Pengadaan Laptop dan LCD untuk Sekolah Minggu	37.500.000	100	36.263.998	96,70
		8. Pengadaan sound system wireless dan Pengadaan Hadycam	20.000.000	100	18.302.725	98,99
		9. Workshop Media Pembelajaran PAK	103.854.000	100	102.540.100	98,74
		10. Festival seni keagamaan Kristen bagi Guru PAK dan Siswa Kristen Prov. NTB	181.925.000	100	181.920.000	100
		11. Pengadaan Buku PAK Siswa SD	33.000.000	100	32.955.020	99,86
		12. Pengadaan Buku PAK siswa SMP.	16.500.000	100	16.477.510	99,86
		13. Pengadaan Buku PAK Siswa SMU	16.500.000	100	16.477.510	99,86
		14. Workshop Penilaian Authentic Assesment bagi Guru PAK	103.915.000	100	102.421.000	98,56
		15. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PAK Non PNS	90.000.000	100	27.000.000	30,00
			Pembayaran Tunjangan Guru Tidak Tetap Agama Kristen	72.000.000	100	28.800.000
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	6. Pengadaan Laptop untuk Penyuluh Agama Kristen PNS	8.740.000	100	6.963.348	79,67
		7. Lokakarya Musi Kristen	33.700.000	100	32.840.000	97,45
		8. Workshop Penyuluh Agama Kristen Non PNS	113.350.000	100	112.117.000	98,91
		9. Bimbingan dan Siaran Mimbar Agama Melalui Media (TVRI & RRI NTB)	25.000.000	100	20.500.000	82,00

		10. Pengadaan Alat Musik Keyboard untuk Gereja	72.000.000	100	71.913,000	99,88
		11. Bantuan Rehab Gedung Ibadah Kristen	120.000.000	100	120.000.000	100
		12. Bantuan Operasional Lembaga Keagamaan Kristen	25.500.000	100	25.500.000	100
		13. Bantuan Operasional LPPD NTB	15.500.000	100	0	0
		14. Dialog Tokoh Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen	47.950.000	100	47.755.000	99,95
		Workshop Pemberdayaan Keluarga Kristen	102.050.000	100	97.180.000	95,23
		Tunjangan Penyuluh Agama Kristen Non PNS	180.000.000	100	121.400.000	67,44
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	17. Pembayaran Gaji dan Tunjangan	147.572.000	100	147.572.000	100
		18. Uang Lelah Tenaga Bantu Administrasi Bimas Kristen	36.000.000	100	21.000.000	58,33
		19. Honor Pejabat KPA	11.400.000	100	11.400.000	100
		20. Honor Pejabat PPSMP	8.700.000	100	1.700.000	100
		21. Honor Pejabat Pembuat Komitmen	10.800.000	100	10.800.000	100
		22. Honor Staf Pengelola Bimas Kristen	6.000.000	100	6.000.000	100
		23. Honor Bendahara Pengeluaran	7.800.000	100	7.800.000	100
		24. Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.600.000	100	3.600.000	100
		25. Rapat Kordinasi dan Konsultasi bersama Ditjen Bimas Kristen dan Pembinaan Ke. Kab./ Kota se NTB	70.550.000	100	49.086.000	69,58
5100	Penyelenggaraan administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	1. Pembayaran tunjangan profesi Guru Agama Katolik PNS.	624.000.000	100	517.341.600	82,91
		Realisasi	2.367.682.000	100	2.139.438.561	91,23

A. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas laporan realisasi anggaran Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL AKUNTABILITAS KEUANGAN BIMAS KRISTEN TAHUN 2016

NO	URAIAN	PAGU (RP) DIPA KANWIL	REALISASI (RP)	TINGKAT CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN
1	Belanja Pegawai	1,029,172,000	958,695,990	(93.15%)	70,476,010
2	Belanja Barang	1,187,285,000	1,155,476,498	(97.32%)	31,808,502
3	Belanja Modal	28,740,000	25,266,073	(87.91%)	3,473,927
4	Bantuan Sosial	0	0	0	0
	Total PAGU dalam DIPA	2,245,197,000	2,139,438,561	(95.29%)	105,758,439

BIMAS KATOLIK

a. Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2016.

Kode	Program	Kinerja	Target	
			Jumlah	%
213	Pengelolaa	16. Workshop Penyusunan	99.390.00	100

9	n dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	Naskah soal UASBN Pendidikan Agama Katolik SD/SMP/SMA/K	0	
		17. Orientasi Guru –Guru Agama Katolik se Provinsi NTB	99.390.00 0	100
		18. Pertemuan Para Penggerak dan Pemerhati Pendidikan Katolik se Provinsi NTB.	50.000.00 0	100
		19. Insentive GTT PAK Pendidikan Dasar	27610000	100
		20. Insentive GTT PAK Pendidikan Menengah	27610000	100
		21. Tunjangan Profesi Guru Non PNS yang belum & sudah Impassing.	'236.100.0 00	100
		22. Tunjangan fungsional Guru Agama Katolik Non PNS	'18.000.00 0	100
		23. Bantuan Komputer Tablet untuk lembaga Pendidikan Agama dan keagamaan.	40.000.00 0	100
214 0	Pengelolaa n dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	15. Tunjangan bagi penyuluh agama katolik non PNS.	75.000.00 0	100
		16. Dialog Kerukunan interen tokoh agama dan tokoh masyarakat Katolik se Pulau Lombok.	'30.510.00 0	100
		17. Mimbar agama Katolik melalui TVRI dan RRI	'9.490.000	100
		18. Bantuan rehabilitasi rumah ibadat	100.000.0 00	100
		19. Bantuan dalam bentuk uang untuk lembaga Meriage Encounter (ME)	10.000.00 0	100
		20. Bantuan dalam bentuk uang untuk lembaga Legio Maria	5.000.000	100
214 1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaa n Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik.	26. Biaya perawatan dan pemeliharaan alat pengolah data	2.000.000	100
		27. Biaya perawatan kendaraan roda dua	3.000.000	100
		28. Pengadaan sony handycam	9.000.000	100
		29. Honor operasional satuan kerja : KPA dan PPSPM.	20.400.00 0	100
		30. Biaya sopir Bimas Katolik.	15.600.00 0	100

		31. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Bimas Katolik	'518.352.000	100
		32. Honor operasional satuan kerja : PPK, Bendahara dan Pengelola..	'29.760.000	100
		33. Belanja perjalanan biasa.	17757000	100
		34. Rapat Kordinasi dan Evaluasi Pembimas, Penyuluh Agama dan Pengawas Agama Katolik	'4.308.000	100
5102	Penyelenggaraan administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	2. Pembayaran tunjangan profesi Guru Agama Katolik PNS.	880.000.000	100
		Realisasi	2.328.877.000	100

3.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi Bimas katolik sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

b. Tabel Target Realisasi Kinerja & Penyerapan Anggaran Tahun 2016.

Kode	Program	Kinerja	Target		Realisasi	
			Jumlah	%	Jumlah	%
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	1. Workshop Penyusunan Naskah soal UASBN Pendidikan Agama Katolik SD/SMP/SMA/K	99.390.000	100	97.785.000	98,38
		2. Orientasi Guru -Guru Agama Katolik se Provinsi NTB	99.390.000	100	98.250.000	98,38
		3. Pertemuan Para Penggerak dan Pemerhati Pendidikan Katolik se Provinsi NTB.	50.000.000	100	49.690.000	99,38
		4. Insentive GTT PAK Pendidikan Dasar	2761000	100		
		5. Insentive GTT PAK Pendidikan Menengah	2761000	100		
		6. Tunjangan Profesi Guru Non PNS yang belum &	'236.100.000	100	'167.750.400	71,05

		sudah Impassing.				
		7. Tunjangan fungsional Guru Agama Katolik Non PNS	'18.000.000	100	10.800.000	60
		8. Bantuan Komputer Tablet untuk lembaga Pendidikan Agama dan keagamaan.	40.000.000	100	'35.098.690	87,75
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	1. Tunjangan bagi penyuluh agama katolik non PNS.	75.000.000	100	57.600.000	76,8
		2. Dialog Kerukunan interen tokoh agama dan tokoh masyarakat Katolik se Pulau Lombok.	'30.510.000	100	'30.290.000	99,27
		3. Mimbar agama Katolik melalui TVRI dan RRI	'9.490.000	100	'9.480.000	99,89
		4. Bantuan rehabilitasi rumah ibadat	100.000.000	100	100.000.000	100
		5. Bantuan dalam bentuk uang untuk lembaga Meriage Encounter (ME)	10.000.000	100	10.000.000	100
		6. Bantuan dalam bentuk uang untuk lembaga Legio Maria	5.000.000	100	5.000.000	100
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik.	1. Biaya perawatan dan pemeliharaan alat pengolah data	2.000.000	100	2.000.000	100
		2. Biaya perawatan kendaraan roda dua	3.000.000	100	'2.990.000	99,66
		3. Pengadaan sony handycam	9.000.000	100	'6.090.723	67,67
		4. Honor operasional satuan kerja : KPA dan PPSPM.	20.400.000	100	20.400.000	100
		5. Biaya sopir Bimas Katolik.	15.600.000	100	15.600.000	100
		6. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Bimas Katolik	'518.352.000	100	'390.209.682	75,28
		7. Honor operasional satuan kerja : PPK, Bendahara dan Pengelola..	'29.760.000	100	'29.760.000	100
		8. Belanja perjalanan biasa.	17757000	100	17.756.450	99,99
		9. Rapat Kordinasi dan Evaluasi Pembimas, Penyuluh Agama dan Pengawas Agama Katolik	'4.308.000	100	'4.308.000	100

510 2	Penyelenggaraan administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	1. Pembayaran tunjangan profesi Guru Agama Katolik PNS.	880.000.000	100	839.450.200	95,39
		Realisasi	2328877000	100	2.050.227.073	88,04

c. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2016 dan Tahun 2015

No	Uraian	TAHUN 2015			TAHUN 2016		
		Pagu (Rp) DIPA Kanwil	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian (%)	Pagu (Rp) DIPA Kanwil	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	2.102.783.000	1.529.668.452	72,74 %	1.783.272.000	1.534.625.056	86,06 %
2	Belanja Barang	992.000.000	956.857.133	96,46 %	536.605.000	528.408.140	98,47 %
3	Belanja Modal	15.000.000	14.925.000	99,50 %	9.000.000	6.090.723	67,67 %
	Total PAGU dalam DIPA	3.109.783.000	2.501.450.585	80,44 %	2.328.877.000	2.069.123.919	88,85 %

Dari sajian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran Bimas Katolik pada tahun 2016 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya yaitu 2015. Penurunan anggaran ini sebesar Rp. 780.906.000 atau 25,11 %. Namun dilihat dari aspek realisasi penyerapan anggaran maka penyerapan anggaran pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 8,41 %, dengan **perbandingan 88,85 % pada tahun 2016 dan 80,44 pada tahun 2015.**

3.3. Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan

Secara umum capaian kinerja Bimas katolik tahun 2016 lebih baik bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015.

- c. Faktor pendukung keberhasilan antara lain :
 7. Regulasi yang semakin jelas khususnya prosedural pencairan
 8. Pengelola dan pihak terkait yang semakin memahami regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran.
 9. Kerjasama yang semakin baik antara pihak terkait : Pimpinan, team verifikasi, dan pengelola.
 10. Spirit dari lima nilai budaya kerja Kementerian Agama.
 11. Sarana dan prasarana yang semakin sempurna dalam menunjang pengelolaan anggaran.
 12. Kontinuitas pendampingan yang diadakan oleh Irjen Kementerian Agama dalam pengelolaan keuangan/Anggaran.
- d. Faktor penghambat, antara lain :
 6. Ada beberapa Juknis yang sedikit memberatkan pengelola untuk mencairkan dana bantuan. Misalnya guru-guru agama katolik tidak tetap (GTT) yang menerima bantuan harus memiliki NUPTK, sementara sebagian besar guru agama katolik tidak tetap, tidak memiliki NUPTK karena mereka adalah tenaga sukarela yang mengajar di Gereja atau di Sekolah-Sekolah (TK – SMA) yang jumlah siswanya tidak memungkinkan untuk diadakan seorang Guru Agama.
 7. Penerima bantuan baik Lembaga Keagamaan maupun perorangan lamban dalam melengkapi persyaratan pencairan dana bantuan.

8. Rangkap tugas yang disebabkan karena keterbatasan tenaga pengelola.

BIDANG HINDU

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Prov. NTB ditunjang anggaran yang berasal dari DIPA Kanwil Kementerian Agama Prov.NTB Tahun 2016. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKT dan penetapan kinerja Tahun 2016. Jika dibandingkan antara program usulan dan realisasi kegiatan, masih jauh dari harapan. Adapun anggaran Bimas Hindu yang sudah direalisasikan berdasarkan Daftar Isian Anggaran (DIPA) Program Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Prov. NTB Tahun Anggaran 2016 berdasarkan:

1. Tabel Serapan Anggaran Berdasarkan Fungsi

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DIPA	REALISASI		KE T
		(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
07	Program Bimbingan Masyarakat Hindu				
1	Belanja Layanan Umum	1.245.307.00	1.230.191.678	98.79 %	
2	Belanja Layanan Agama	944.000.000	887.328.300	94.00 %	
3	Belanja Layanan Pendidikan	2.462.150.00	2.135.126.600	86.72 %	
	Jumlah Anggaran	4.651.457.00	4.252.646.578	91.43 %	

2. Berdasarkan Kegiatan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DIPA	REALISASI		KET
		(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6

07	Program Bimbingan Masyarakat Hindu				
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	944.000.000	887.328.300	94.00 %	
2	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	1.245.307.000	1.230.191.678	98.79 %	
3	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	1.262.150.000	936.289.800	74.18 %	
4	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	1.200.000.000	1.198.836.800	99.90 %	
	Jumlah Anggaran	4.651.457.000	4.252.646.578	91.43 %	

3. Berdasarkan Jenis Belanja

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DIPA	REALISASI		KE T
		(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
07	Program Bimbingan Masyarakat Hindu				
1	Belanja Pegawai	2.496.707.000	2.490.041.892	99.73 %	
2	Belanja Barang	2.094.750.000	1.703.527.200	81.32 %	

		00	00		
3	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	
4	Belanja Modal	60.000.000	59.077.486	98.46 %	
	Jumlah Anggaran	4.651.457.000	4.252.646.578	91.43 %	

4. Berdasarkan Ouput Kegiatan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DIPA	REALISASI		KET
		(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
07	Program Bimbingan Masyarakat Hindu				
A.	Pengelolaan Urusan Agama Hindu				
1.	Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Penyuluh	120.000.000	114.106.600	95%	
2.	Tunjangan Penyuluh Agama Hindu Non PNS	144.000.000	144.000.000	100%	
3.	Penyuluh Teladan	41.000.000	0	0%	Self Blocking
4.	Simakrama Umat	31.500.000	31.350.000	99%	
5.	Penyiaran Penyuluhan	27.500.000	27.500.000	100%	
6.	Dialog Pinandita/Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat/ Pemuda/ Wanita	120.000.000	119.627.900	99%	
7.	Pembinaan dan Pemberdayaan	60.000.000	59.450.000	99%	

	Ekonomi Umat				
8.	Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu	116.125.000	110.275.000	95%	
9.	BOP PHDI	33.875.000	32.384.400	96%	
10.	BOP LPDG	50.000.000	50.000.000	100%	
11.	Bantuan pembangunan / Rehab Tempat Ibadah	160.000.000	159.884.400	99%	
12.	Sarana Keagamaan	40.000.000	38.750.000	97%	
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan B. Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu				
1.	Layanan Sekretariat	80.000.000	76.349.100	95%	
2.	Layanan Perkantoran (Gaji dan Operasional)	1.105.307.000	1.094.765.092	99%	
3.	Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	60.000.000	59.077.486	98%	
	Kegiatan Pengelolaan dan C. Pembinaan Pendidikan Agama Hindu				
1.	Pembayaran Tunjangan Guru Agama Hindu Non PNS	144.000.000	144.000.000	100%	
2.	Seleksi Jambore Pasraman Nasional 2016 Provinsi NTB	171.000.000	46.050.000	92%	
3.	Pembinaan dan	96.250.000	86.620.800	90%	

	Pengiriman Kontingen Jambore Pasraman Nasional 2016 Provinsi NTB				
4.	Penyelenggaraan Pasraman Kilat (3 Kegiatan)	100.900.000	100.150.000	99%	
5.	Bantuan KKG dan MGMP	120.000.000	120.000.000	100%	
6.	Penyusunan Soal UAS Agama Hindu	32.690.000	32.690.000	100%	
7.	Orientasi Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan Agama Hindu	96.750.000	92.050.000	95%	
8.	Orientasi Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Guru Agama Hindu	100.560.000	99.455.800	99%	
9.	Bantuan Sarana dan Prasarana PAUD	75.000.000	75.000.000	100%	
10.	Bantuan Sarana dan Prasarana Pasraman	300.000.000	0	0%	Self Blocki ng
11.	Monitoring Bantuan	25.000.000	15.623.200	62%	
D.	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu				
1.	Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNS Agama Hindu	1.197.000.00 0	1.195.836.800	99%	

2.	Pembayaran Tunjangan Tambahan Guru PNS Agama Hindu	3.000.000	3.000.000	100%	
	Jumlah Anggaran	4.651.457.000	4.252.646.578	91.43%	

BIMAS BUDHA

b. Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2016.

Kode	Program	Kinerja	Target	
			Jumlah	%
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	1. Bantuan Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non PNS	118.800.000	100
		2. Bantuan operasional lembaga agama dan keagamaan Buddha	125.000.000	100
		3. Pengiriman Kontingen Yobbana Dhamma Samaya	71.050.000	100
		4. Pembekalan Pranikah Keluarga Hita Sukaya	119.725.000	100
		5. Pembinaan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Buddha	59.050.000	100
		6. Bimbingan dan Penyiaran Agama Melalui Media	30.232.000	100
		7. Bantuan pembangunan / Rehab Tempat Ibadah	150.000.000	100
2146	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	8. Layanan Internal Organisasi	101.620.000	100
		9. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan perkantoran	104.830.000	100
		10. Pengadaan Portable	10.000.000	100

		Amplifaer Wirelles		
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	11.Orientasi Pekan Penghayatan Dhamma untuk Pelajar Buddhis	124.400.000	100
		12.Pembinaan Pemuda dan Pelajar Buddhis Anti Narkoba	50.148.000	100
		13.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	72.450.000	100
		14.Sippa Dhamma Samajja Tk. Prov. NTB	286.175.000	100
		15.Workshop Pendidikan dan Pendalaman Kitab Suci Dhammapada	132.250.000	100
		16.Pembinaan Pemuda dan Pelajar tentang Kesehatan menurut Buddhis	79.205.000	100
		17.Tunjangan Profesi Guru Agama Buddha Non PNS	126.000.000	100
		18.Pembinaan Tenaga Pendidik Formal dan Non Formal	10.125.000	100
		19.Workshop Penyusunan Media Pembelajaran Sekolah Minggu	137.100.000	100
		20.Workshop Penyusunan bahan Ajar Pendidikan Agama Buddha	137.100.000	100
		21.Penyempurnaan Penyusunan bahan Ajar Pendidikan Agama Buddha	137.100.000	100

		22.Workshop Penyusunan Kisi-Kisi Soal dan Penilaian Agama Buddha Tk. SD/SMP/SMA	137.100.000	100
		23.Bantuan Guru Pendidikan Agama Buddha Non PNS	468.000.000	100
		24.Orientasi Pengurus Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	124.400.000	100
		25.Rapat Koordinasi Lembaga Pendidikan Agama Buddha	95.720.000	100
		26.Monitoring dan Evaluasi ke Sekolah Umum,SMB,dan Dhammasekha	10.600.000	100
		27.Bantuan Operasional lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha	1.775.000.00 0	100
5105	Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	28.Pembayaran gaji dan Tunjangan PNS	1.086.573.00 0	100
		29.Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Agama Buddha PNS	673.821.000	100
JUMLAH			6.527.353.00 0	

3.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi Bimas Buddha sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

d. Tabel Target Realisasi Kinerja & Penyerapan Anggaran Tahun 2016.

Kode	Program	Kinerja	Target		Realisasi	
			Jumlah	%	Jumlah	%
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	1. Bantuan Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non PNS	118.800.000	100	118.800.000	100%
		2. Bantuan operasional lembaga agama dan keagamaan Buddha	125.000.000	100	125.000.000	100%
		3. Pengiriman Kontingen Yobbana Dhamma Samaya	71.050.000	100	61.901.750	87%
		4. Pembekalan Pranikah Keluarga Hita Sukaya	119.725.000	100	111.325.000	93%
		5. Pembinaan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Buddha	59.050.000	100	52.915.000	90%
		6. Bimbingan dan Penyiaran Agama Melalui Media	30.232.000	100	20.570.000	68%
		7. Bantuan pembangunan / Rehab Tempat Ibadah	150.000.000	100	150.000.000	100%
2146	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	8. Layanan Internal Organisasi	101.620.000	100	70.966.100	70%
		9. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan perkantoran	104.830.000	100	83.040.450	79%
		10. Pengadaan Portable Amplifaer Wirelles	10.000.000	100	5.000.000	50%
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan	11. Orientasi Pekan Penghayatan Dhamma untuk Pelajar Buddhis	124.400.000	100	118.175.000	95%
		12. Pembinaan Pemuda dan Pelajar Buddhis Anti	50.148.000	100	46.050.000	92%

n Agama Buddha	Narkoba				
	13.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	72.450.000	100	0	Save blokin g
	14.Sippa Dhamma Samajja Tk. Prov. NTB	286.175.000	100	283.105.000	99%
	15.Workshop Pendidikan dan Pendalaman Kitab Suci Dhammapada	132.250.000	100	114.187.000	86%
	16.Pembinaan Pemuda dan Pelajar tentang Kesehatan menurut Buddhis	79.205.000	100	49.610.000	63%
	17.Tunjangan Profesi Guru Agama Buddha Non PNS	126.000.000	100	126.000.000	100%
	18.Pembinaan Tenaga Pendidik Formal dan Non Formal	10.125.000	100	5.050.000	50%
	19.Workshop Penyusunan Media Pembelajaran Sekolah Minggu	137.100.000	100	122.048.000	89%
	20.Workshop Penyusunan bahan Ajar Pendidikan Agama Buddha	137.100.000	100	120.378.900	88%
	21.Penyempurnaan Penyusunan bahan Ajar Pendidikan Agama Buddha	137.100.000	100	119.240.000	87%
	22.Workshop Penyusunan Kisi-Kisi Soal dan Penilaian Agama Buddha Tk. SD/SMP/SMA	137.100.000	100	122.935.200	90%
	23.Bantuan Guru Pendidikan Agama Buddha Non PNS	468.000.000	100	435.600.000	93%
	24.Orientasi Pengurus	124.400.000	100	111.525.000	90%

		Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	0		0	
		25.Rapat Koordinasi Lembaga Pendidikan Agama Buddha	95.720.000	100	2.750.000	0.29%
		26.Monitoring dan Evaluasi ke Sekolah Umum,SMB,dan Dhammasekha	10.600.000	100	4.700.000	44%
		27.Bantuan Operasional lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha	1.775.000.00	100	1.175.000.00	66%
5105	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	Pembayaran gaji dan Tunjangan PNS	1.086.573.00	100	1.086.568.38	96%
		Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Agama Buddha PNS	673.821.000	100	673.820.600	99%
Jumlah			6.527.353.00		4.841.384.48	73.62%

e. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2016 dan Tahun 2015

No	Uraian	TAHUN 2015			TAHUN 2016		
		Pagu (Rp) DIPA Kanwil	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian (%)	Pagu (Rp) DIPA Kanwil	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	2.233.080.00	1.735.692.703	77.73%	1.946.973.00	1.765.912.018	90.70%

2	Belanja Barang	4.776.580.000	2.193.312.850	45.92 %	4.570.380.000	3.070.472.400	67.18 %
3	Belanja Modal	413.000.000	255.953.000	61.97 %	10.000.000	5.000.000	50.00 %
	Total PAGU dalam DIPA	7.422.660.000	4.184.958.553	56.38 %	6.527.353.000	4.841.384.418	74.17 %

Dari sajian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran Bimas Buddha pada tahun 2016 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya yaitu 2015. Penurunan anggaran ini sebesar Rp. 895.307.000 atau 87.93%. Namun dilihat dari aspek realisasi penyerapan anggaran maka penyerapan anggaran pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 17.79 %, dengan **perbandingan 74.17% pada tahun 2016 dan 56.38% pada tahun 2015.**

3.3. Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan

Secara umum capaian kinerja Bimas Buddha tahun 2016 lebih baik bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015.

e. Faktor pendukung keberhasilan antara lain :

13. Regulasi yang semakin jelas khususnya prosedural pencairan
14. Pengelola dan pihak terkait yang semakin memahami regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran.
15. Kerjasama yang semakin baik antara pihak terkait : Pimpinan, team verifikasi, dan pengelola.
16. Spirit dari lima nilai budaya kerja Kementerian Agama.
17. Sarana dan prasarana yang semakin sempurna dalam menunjang pengelolaan anggaran.

18. Kontinuitas pendampingan yang diadakan oleh Irjen Kementerian Agama dalam pengelolaan keuangan/Anggaran.
- f. Faktor penghambat, antara lain :
9. Ada beberapa Juknis yang sedikit memberatkan pengelola untuk mencairkan dana bantuan. Misalnya guru-guru agama buddha tidak tetap (GTT) yang menerima bantuan harus memiliki NUPTK, sementara sebagian besar guru agama buddha tidak tetap, tidak memiliki NUPTK karena untuk membuat NUPTK pada Instansi terkait (LPMP) mengalami kesulitan sehingga guru-guru agama buddha tidak tetap (GTT) sampai saat ini sebagian besar belum memiliki NUPTK.
 10. Penerima bantuan baik itu bantuan dari Lembaga Keagamaan (organisasi) maupun perorangan sangat lamban dalam melengkapi persyaratan pencairan dana bantuan disamping jarak lokasi yang ditempuh sangat jauh serta sulitnya jaringan komunikasi di tempat tersebut.
 11. Guru-Guru Agama Buddha yang menerima Tunjangan Profesi sangat lamban dalam mengumpulkan berkas-berkas persyaratan pencairan TPG disamping juga karena lokasi instansi terkait sangat jauh jarak tempuhnya sehingga sebagian besar guru-guru mengalami keterlambatan didalam pengumpulan berkas dan proses pencairan menjadi terhambat.
 12. Ada beberapa point yang tercantum pada juknis bantuan sosial lembaga keagamaan membuat penerima bantuan mengalami kesulitan untuk melengkapi persyaratan bantuan yang harus dipenuhi .
 13. Rangkap tugas yang disebabkan karena keterbatasan tenaga pengelola
 14. Ruang Kerja Bimas Buddha yang tidak memadai dan tidak nyaman menyebabkan terganggunya kinerja bimas Buddha sehingga tidak dapat berkerja secara maksimal.

BAB IV

PENUTUP

Laporan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016 merupakan wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016. Menurut laporan dan pembahasan pada masing-masing bidang, seluruh program dan kegiatan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Ini berarti bahwa capaian kinerja pada tahun 2016 telah memenuhi kuantitas target dan dilaksanakan secara tuntas.

Adapun sasaran yang dituju adalah:

1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan
2. Peningkatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan
3. Peningkatan proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama
4. Peningkatan ketersediaan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat
5. Peningkatan akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama
6. Penyelenggaraan tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
7. Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama
8. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama
9. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
10. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien dan akuntabel
11. Peningkatan akses masyarakat tidak mampu terhadap program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP)
12. Meningkatkan angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah
13. Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan

Namun demikian, selain ketuntasan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, aspek kualitas perlu diperhitungkan. Beberapa program juga perlu dibenahi mutunya, sehingga target kualitas pun dapat dipenuhi.

Dalam melaksanakan tugas pokok maupun rutin masih dijumpai adanya hambatan – hambatan baik teknis maupun non teknis antara lain jumlah pegawai yang masih kurang, terutama pelaksana (staf) sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas tidak dapat berjalan dengan optimal, terbatasnya anggaran yang menunjang kegiatan kedinasan sehingga kebutuhan sarana dan prasarana tidak tercukupi, dan mutu pendidikan penjenjangan, pelatihan dan penataran bagi para pegawai / pejabat yang dinilai kurang. Ini mengakibatkan persoalan yang terjadi dilapangan sering kali tidak terjawab.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan cara meningkatkan 5 nilai budaya kerja kementerian agama. Selain itu jugameningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk mempelajari aturan-aturan yang bersumber dari program dan kegiatan, atau buku / kepustakaan, serta secara aktif mencari informasi mengenai peraturan – peraturan yang diperlukan baik ke melalui media cetak maupun elektronik.